

Fahri Hidayat



Konseptualisasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kebudayaan dan Gerakan Sosial



**KONSEPTUALISASI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BERBASIS KEBUDAYAAN
DAN GERAKAN SOSIAL**

Fahri Hidayat

Konseptualisasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kebudayaan dan Gerakan Sosial

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Global Aksara Pers

ISBN: 978-623-5874-64-7
viii + 106 hal; 15,5 x 23 cm
Cetakan Pertama, Januari 2022

copyright © Januari 2022 Global Aksara Pers

Penulis : Fahri Hidayat
Penyunting : Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd.
Desain Sampul : Arum Nur Laili
Layouter : Ilil Ni'matul M

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta, yang telah memberikan karunia kepada kita berupa iman, kesehatan, dan kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada nabi Muhammad, sang suri tauladan, yang telah memberikan teladan dan contoh nyata kepada kita untuk senantiasa mengoptimalkan kesehatan dan kesempatan untuk mengalirkan kebaikan-kebaikan bagi sesama.

Buku ini disusun di tengah-tengah *Work From Home* (WFH) karena pandemi COVID 19 sebagai ikhtiar penulis untuk menyempurnakan tugas sebagai dosen. Selama masa pandemi, tugas tri dharma perguruan tinggi dilaksanakan oleh penulis di rumah secara daring (*online*). Mengajar secara daring tentu saja berbeda dengan tatap muka. Ada banyak masalah dan kendala teknis yang sering penulis temukan selama proses pembelajaran daring, di antaranya kendala sinyal dan jaringan.

Tatap muka dengan mahasiswa secara *online* cenderung tidak dapat dilaksanakan secara penuh karena menghabiskan banyak kuota. Biasanya, dalam 2 SKS (100 menit), tatap muka *online* hanya dilaksanakan sekitar 30-40 menit, selebihnya perkuliahan dilakukan dengan cara berdiskusi di group whatsapp, e-class, atau memberikan kegiatan / tugas tertulis kepada mahasiswa. Menurut

pengalaman penulis, dalam durasi 30-40 menit tersebut dosen belum bisa optimal dalam menyampaikan materi.

Berangkat dari hal tersebut maka penulis menyusun buku ini. Penulis berasumsi bahwa pembelajaran daring sangat membutuhkan buku teks yang ditulis sendiri oleh dosen pengampunya. Memang, buku teks yang ditulis dosen pengampu bukan satu-satunya sumber pengetahuan dan informasi. Akan tetapi, dengan mengajarkan buku teks yang ditulis sendiri oleh dosen pengampu, maka akan lebih mudah terjalin dialog antara dosen dengan mahasiswa. Apalagi, selama pembelajaran daring dosen dan mahasiswa tidak bertemu secara langsung. Meskipun demikian, buku teks bukan hanya bermanfaat untuk pembelajaran daring saja, namun juga sangat diperlukan dalam pembelajaran tatap muka (*luring / offline*) sebagaimana biasanya.

Sebagai penutup, buku ini adalah “pengantar” dan pintu masuk kajian pendidikan Islam. Sebagai sebuah pengantar, maka kajian di dalam buku ini masih bersifat dasar. Kajian di dalam buku ini masih membutuhkan kajian-kajian lanjutan. Di samping itu, buku ini tentu belum sempurna, saran dan kritik yang membangun tentu sangat penulis harapkan dari para pembaca sekalian. Semoga buku ini bermanfaat.

Magelang, 27 november 2021

Penulis

Fahri Hidayat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian	4
C. Metode	5
BAB II ISLAM, KEBUDAYAAN, DAN GERAKAN	
SOSIAL	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Penelitian Terdahulu	56
BAB III HASIL PENELITIAN	61
A. Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Kiprah	
Pendidikannya	61
B. KH Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kiprah	
Pendidikannya	71
C. Diskusi: Konseptualisasi PAI Berbasis	
Kebudayaan dan Gerakan Sosial	76
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Penutup.....	104
Daftar Pustaka	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam, khususnya Pendidikan Agama Islam yang ada di masyarakat saat ini secara umum masih kehilangan konteks kemasyarakatan. Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan melalui ceramah-ceramah keagamaan, khutbah jumat, kuliah subuh, pengajian, dan lain sebagainya seharusnya berorientasi pada pengembangan masyarakat. Jika masyarakat diibaratkan sebagai pepohonan, maka yang dimaksud dengan “mengembangkan” di sini artinya Pendidikan Agama Islam seharusnya berfungsi sebagai “pupuk” yang menyuburkan pepohonan tersebut, agar pohon-pohon tersebut dapat tumbuh dengan baik dan bermanfaat. Jadi, tidak perlu mencabut akar pepohonan tersebut dan memindahkannya ke tempat lain. Atau mengganti tanah yang ada dengan tanah yang lain. Fungsi Pendidikan Agama Islam adalah sebagai “pupuk”, yang berfungsi “mengembangkan”, bukan “mengubah”.

Berdasarkan pada analogi di atas, maka orientasi yang seharusnya diupayakan dalam Pendidikan Agama Islam adalah “mengembangkan” masyarakat agar tumbuh dengan baik dan

“bermanfaat”. Ada dua kata kunci di sini yang sekaligus problem utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu “mengembangkan” dan “bermanfaat”. Problem pertama dalam pendidikan Agama Islam adalah belum berorientasi pada upaya “mengembangkan” masyarakat. Pendidikan Agama Islam saat ini justru terlihat berupaya “mengubah” masyarakat. “Mengubah” artinya mencabut masyarakat dari akar kebudayaannya dan menggantinya dengan kebudayaan yang lain. Hal ini bisa dilihat dari menguatnya simbolisme agama, seperti penekanan pada pakaian dan asesoris-asesoris keagamaan, seperti baju koko, kopiah, peci, jubah, ataupun tata cara pemanggilan yang mengubah “saudara” menjadi “akhi”, “ayah” menjadi “abi”, “anda” menjadi “anta atau antum” dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu bukan hal buruk. Akan tetapi, sudah tentu hal tersebut bukan merupakan substansi dari agama Islam yang sesungguhnya. Sehingga, penekanan pada hal-hal tersebut justru akan mengaburkan substansi agama Islam yang sesungguhnya sangat luas.

Selain itu, penekanan pada simbolisme agama justru melahirkan problem kebudayaan. Sebab, simbol-simbol agama yang biasa digunakan justru merupakan simbol-simbol kebudayaan Arab. Tentu menggunakan simbol budaya Arab bukan merupakan hal yang buruk. Akan tetapi karena agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil `alamin*, agama rahmat untuk semua umat manusia dengan berbagai latar belakang etnis dan kebudayaan, maka dengan sendirinya agama Islam mengakomodir kearifan lokal

yang ada pada setiap kebudayaan. Maka, seharusnya Pendidikan Agama Islam dikembangkan berdasarkan “fitrah” kebudayaan masyarakatnya.

Masalah kedua dalam Pendidikan Agama Islam di masyarakat adalah penekanan agama sebagai dogma, bukan sebagai gerakan sosial. Dalam hal ini, pelaksanaan pendidikan Agama Islam di masyarakat banyak yang masih berhenti pada ceramah, pengajian, khutbah, dan kegiatan-kegiatan lain yang intinya hanya pengayaan “wacana keislaman”, bukan “agenda kegiatan”. Dalam hal ini, Pendidikan Agama Islam kehilangan konteks sosial. Padahal, justru seharusnya Pendidikan Agama Islam berorientasi pada pemecahan problem-problem sosial yang ada.

Berangkat dari dua masalah tersebut, maka peneliti berupaya untuk melakukan kajian akademik berupa penelitian ilmiah untuk merumuskan konsep Pendidikan Agama Islam yang berbasis pada kebudayaan dan gerakan sosial. Dalam kajian literatur yang dilakukan peneliti, ada dua tokoh pendidikan yang dapat dikomparasikan pemikiran pendidikannya, yaitu KH. Ahmad Dahlan dan Ki Hadjar Dewantara. KH Ahmad Dahlan, menurut hemat penulis, merupakan tokoh agama yang berorientasi pada gerakan sosial. Hal ini dapat dilihat dari gerakannya dalam memobilisasi massa untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan pendidikan melalui panti asuhan dan sekolah-sekolah yang didirikannya. Adapun, Ki Hadjar Dewantara merupakan tokoh penting pendidikan yang dikenal dengan orientasi kebudayaan yang kuat.

Oleh karenanya, penulis merancang proposal penelitian ini dengan mengangkat judul "KONSEPTUALISASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KEBUDAYAAN DAN GERAKAN SOSIAL: Studi Komparasi Pemikiran Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan KH Ahmad Dahlan"

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan di dalam penelitian ini diidentifikasi dalam dua poin utama, yaitu: *pertama* adanya pemahaman yang memisahkan antara agama dengan aspek kebudayaan. *Kedua*, adanya pemahaman yang memisahkan antara agama Islam dengan gerakan sosial.

Permasalahan di dalam penelitian ini dibatasi dalam dua hal pokok, yaitu *pertama* mendeskripsikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berbasis kebudayaan, dan mengkorelasikannya dengan pendidikan agama Islam. *Kedua*, mendeskripsikan pemikiran KH Ahmad Dahlan tentang agama dan gerakan sosial serta mengkorelasikannya dalam pendidikan agama Islam. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka ada tiga pertanyaan penelitian yang dikaji yaitu: *pertama*, bagaimana konsep pendidikan berbasis kebudayaan menurut Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam?, *kedua*, bagaimana konsep pendidikan Agama Islam menurut KH Ahmad Dahlan? Dan *ketiga*, bagaimana konsep pendidikan Agama Islam berbasis kebudayaan dan gerakan sosial berdasarkan kombinasi pemikiran

dari KH Ahmad Dahlan dan Ki Hadjar Dewantara? Hasil penelitian ini memiliki signifikansi sebagai rumusan konsep Pendidikan Agama Islam di masyarakat yang berbasis pada kebudayaan dan gerakan sosial. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman konseptual-praktis dalam penerapan Pendidikan Agama Islam di masyarakat yang tidak hanya berhenti pada dogma saja, tapi memiliki daya gerak untuk aksi nyata, yang tidak anti kebudayaan, tapi justru menjadikan budaya lokal sebagai potensi.

C. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah lainnya.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu pendeskripsian data dengan cara menghimpun data dan menyusun kembali data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis, guna menemukan hakikat makna sehingga dapat dipahami secara murni dan komperhensif.¹ Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji ide, gagasan, dan pendapat tentang integrasi ilmu dari literatur tertentu baik buku, majalah, jurnal, atau

¹ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.29.

dokumen yang dipandang mempunyai relevansi terhadap pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis-historis. Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan secara hakikat yang mendasari konsep-konsep pemikiran.² Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalah pokok yang berkaitan dengan konsep-konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan Ahmad Dahlan dari sisi historisnya dan merumuskannya dalam konsep pendidikan Agama Islam.

Melihat jenis penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian kepustakaan dan lapangan, maka metode pengumpulan data yang digunakan terkait dengan studi kepustakaan adalah berbagai buku, tulisan, artikel, jurnal, ataupun majalah yang mempunyai relevansi dengan tema pokok penelitian ini. Penelitian ini merupakan suatu kajian tentang model integrasi ilmu untuk Perguruan Tinggi Agama Islam. Adapun rujukan primer dalam penelitian ini adalah:

1. Ki Hadjar Dewantara, Menuju Manusia Merdeka, Yogyakarta 1986 : Penerbit Leutika.
2. Ki Hadjar Dewantara, Pendidikan : Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1990.
3. Ki Hadjar Dewantara, Kebudayaan : Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1990.

² Anton Baker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

4. Achmadi, "Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan", Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2002.
5. Achmad Jainuri, "Tradisi Tajdid dalam Sejarah Islam", *Suara Muhammadiyah* No. 05/08/1995

Selain itu sumber data sekunder juga dilacak dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, majalah, jurnal, dan penulisan lain yang dijadikan pendukung dalam penulisan penelitian ini. Sumber-sumber sekunder tersebut antara lain

1. Wan Mohd Nur Wan Daud, "*Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed Moh Naquib al-Attas*". Penerjemah: Hamid Fahmy, dkk. (Bandung: Mizan, 2003)
2. Abdul Munir Mul Khan, "Gerakan "Pemurnian Islam" di Pedesaan (Kasus Muhammadiyah Kecamatan Wuluhan Jember Jawa Timur)", Disertasi UGM, 1999.
3. Bagus Gunawan, *Percikan Pemikiran Tokoh Pendidikan Nusantara: Dari Era Mataram sampai Kemerdekaan*, Solo: Media Tama, 2013.
4. Dyah Kumala, *Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*, Yogyakarta, UNY Press, 2013.
5. Abdur Rachman Assegaf. *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif Interkonektif*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011)
6. *The Concept of Education in Islam*, diterjemahkan oleh Haidar Bagir kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Konsep Pendidikan dalam Islam*:

*Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan
Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas.³*

³ Syed Muhammad Naquib al-Attas. *The Concept of Education in Islam*. (ABIM, Kuala Lumpur, 1980) diterjemahkan oleh Haidar Baqir, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984)

BAB II

ISLAM, KEBUDAYAAN, DAN GERAKAN SOSIAL

A. Kajian Teori

Dari kaca mata sosiologis, agama didefinisikan sebagai seperangkat ritual atau praktik, maupun seperangkat kepercayaan. Kepercayaan dan ritual itu terorganisasi secara sosial dan diberlakukan oleh anggota-anggota suatu masyarakat atau beberapa segmen masyarakat.⁴ Oleh karena ajaran agama meniscayakan sebuah pengamalan dalam bentuk perilaku di dunia sosial, maka dengan sendirinya agama memiliki implikasi sosial kebudayaan.

Definisi agama yang hanya membatasinya sebagai struktur keyakinan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, atau hubungan manusia dengan “yang ghaib”, “yang tidak terlihat”, dan “yang tidak terjangkau oleh manusia” mendapatkan banyak kritik dari para sarjana. Sebab, agama di dalam pengertian tersebut hanya memiliki sifat personal, seolah-olah terisolasi dimensi sosial dan kebudayaan. Jika ketaatan seseorang terhadap agamanya hanya diukur dengan ketaatan di rumah

⁴ Mahmud dan Ija Suntana, *Antropologi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 74.

ibadah saja, maka hal tersebut dengan sendirinya telah mendikotomi agama dari urusan keduniaan. Padahal, justru kualitas keberagamaan manusia pada hakikatnya dilihat dari kualitas kehidupannya di dunia.

Pengertian agama yang dibatasi pada keyakinan vertikal kepada Tuhan dikritik oleh sebagian sarjana karena dirasa kurang komprehensif ketika merujuk kepada agama di dalam pengertian Islam. Kata agama sendiri sebenarnya bukan merupakan istilah dari Al Qur'an. Kata "agama" biasa digunakan sebagai terjemahan kata *din* dan bahkan dianggap memiliki makna yang sama. Padahal, kedua kata tersebut memiliki konsep yang berbeda.⁵ Istilah agama berasal dari bahasa sansekerta, 'a' dan 'gam' yang berarti tidak berubah.⁶ Konsep tersebut belum bisa mencangkup keseluruhan maksud agama di dalam pengertian Islam, sebab di dalam Islam agama bukan hanya diterjemahkan sebagai hubungan manusia dengan Tuhan saja, namun juga hubungan antar manusia sehingga melahirkan kebudayaan.

Menurut Chris Jenks, kebudayaan dapat dijelaskan dan dipahami sebagai suatu keadaan pemikiran umum. Konsep ini mengandung ide penyempurnaan, sebuah tujuan atau aspirasi tentang prestasi atau emansipasi individu. Di satu sisi, kebudayaan dapat merupakan sebuah refleksi dari suatu filsafat yang sangat individualis dan di sisi lain adalah contoh sebuah komitmen filosofis terhadap

⁵ Fahri Hidayat, *Islamic Bulding : Konstruksi Dasar dalam Bangunan Studi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Senja, 2018), hlm. 34.

⁶ Hartono, *Pendidikan Integratif*, (Purwokerto: STAIN Press, 2011), hlm. 19.

ibadah saja, maka hal tersebut dengan sendirinya telah mendikotomi agama dari urusan keduniaan. Padahal, justru kualitas keberagamaan manusia pada hakikatnya dilihat dari kualitas kehidupannya di dunia.

Pengertian agama yang dibatasi pada keyakinan vertikal kepada Tuhan dikritik oleh sebagian sarjana karena dirasa kurang komprehensif ketika merujuk kepada agama di dalam pengertian Islam. Kata agama sendiri sebenarnya bukan merupakan istilah dari Al Qur`an. Kata "agama" biasa digunakan sebagai terjemahan kata *din* dan bahkan dianggap memiliki makna yang sama. Padahal, kedua kata tersebut memiliki konsep yang berbeda.⁵ Istilah agama berasal dari bahasa sansekerta, 'a' dan 'gam' yang berarti tidak berubah.⁶ Konsep tersebut belum bisa mencangkup keseluruhan maksud agama di dalam pengertian Islam, sebab di dalam Islam agama bukan hanya diterjemahkan sebagai hubungan manusia dengan Tuhan saja, namun juga hubungan antar manusia sehingga melahirkan kebudayaan.

Menurut Chris Jenks, kebudayaan dapat dijelaskan dan dipahami sebagai suatu keadaan pemikiran umum. Konsep ini mengandung ide penyempurnaan, sebuah tujuan atau aspirasi tentang prestasi atau emansipasi individu. Di satu sisi, kebudayaan dapat merupakan sebuah refleksi dari suatu filsafat yang sangat individualis dan di sisi lain adalah contoh sebuah komitmen filosofis terhadap

⁵ Fahri Hidayat, *Islamic Bulding : Konstruksi Dasar dalam Bangunan Studi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Senja, 2018), hlm. 34.

⁶ Hartono, *Pendidikan Integratif*, (Purwokerto: STAIN Press, 2011), hlm. 19.

partikulturalitas dan perbedaan, bahkan 'keistimewaan' atau superioritas umat manusia.⁷

Jadi, secara lebih ringkas kebudayaan dapat diartikan sebagai sebuah ide dan pikiran kolektif yang dimanifestasikan dalam perilaku kolektif sebuah masyarakat. Oleh karenanya kebudayaan lahir dari komunitas maka kebudayaan cenderung bersifat lokal meskipun tidak menutup diri dari pengaruh-pengaruh luar masyarakat tersebut.

Kebudayaan memiliki peran penting dalam mengintegrasikan dan menghasilkan tatanan sosial.⁸ Hal ini disebabkan karena secara alamiah orang cenderung merasa dekat dengan orang lain yang memiliki bahasa, adat istiadat, dan pikiran yang serupa meskipun tidak sama persis. Ini bisa dipahami jika kita berangkat dari pengertian bahwa budaya lahir dari ide kolektif masyarakat. Dengan begitu, jika ada orang yang berbudaya mirip dengan kita, artinya ia memiliki ide, pikiran, dan pandangan hidup yang juga mirip dengan kita.

Menurut Burckhard sebagaimana dikutip Kuntowijoyo, kebudayaan ialah sebuah kenyataan campuran. Tugas sejarawan adalah mengkoordinasikan elemen-elemen ke dalam gambaran umum.⁹ Sementara itu, Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

⁷ Chris Jenks, *culture*, hlm. 9-10.

⁸ Nike Featherstone, *Postmodernisme dan Budaya Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 312.

⁹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hlm. 136.

kebudayaan adalah struktur masyarakat.¹⁰ Ada perbedaan mendasar antara struktur dengan bentuk. Struktur adalah apa yang mendasari bentuk sebuah masyarakat; ide-ide, keyakinan, atau pemikiran keagamaan yang dengannya bentuk sebuah masyarakat tercipta. Dalam pengertian ini, sejarah kebudayaan seharusnya menempatkan struktur masyarakat sebagai kajian utamanya tanpa harus melupakan kajian tentang bentuk-bentuknya.

Koentjaraningrat membagi kebudayaan menjadi tiga wujud, yaitu *pertama*, kebudayaan sebagai sistem ide, *kedua* kebudayaan sebagai sistem aktivitas, dan *ketiga* kebudayaan sebagai sistem artefak.¹¹ Sebagai sebuah ide, kebudayaan tidak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan dapat dipahami dari beberapa nilai, norma-norma kemasyarakatan, adat istiadat, dan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Pada gilirannya, wujud ide ini akan bermetamorfosa ke wujud aktivitas. Pada titik ini, kebudayaan sebuah masyarakat dapat dilihat dan diamati oleh karena aktivitas adalah sesuatu yang tidak abstrak. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, jika hal tersebut dilakukan secara kolektif sehingga menjadi sebuah kebiasaan komunitas, maka hal itu dapat dikatakan sebagai budaya masyarakat tersebut.

Puncak dari metamorfosa kebudayaan adalah simbol-simbol fisik yang disebut oleh Koentjaraningrat sebagai artefak. Contoh artefak pada kebudayaan zaman dulu adalah koloseum yang

¹⁰ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 139.

¹¹ *Khazanah Antropologi*, 59.

ada di Roma. Koloseum adalah simbol kebudayaan Roma pada era klasik. Fungsi Koloseum pada zaman itu adalah semacam stadion untuk mempertontonkan pertarungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan binatang buas. Aktivitas ini (pertarungan antar manusia) lahir dari ide dasar tentang manusia bahwa dalam falsafah masyarakat Roma saat itu esensi manusia adalah pada fisiknya. Sehingga manusia yang dianggap paling sejati adalah yang memiliki fisik yang kuat. Ide tentang manusia ini mewujud ke dalam aktivitas dan berakhir menjadi sebuah artefak yang disebut Koloseum.

Kebudayaan memiliki unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Koentjaraningrat membagi unsur-unsur kebudayaan menjadi tujuh, yaitu *pertama* sistem bahasa, *kedua* sistem pengetahuan, *ketiga* sistem kekerabatan dan organisasi sosial, *keempat* sistem peralatan hidup dan teknologi, *kelima* sistem ekonomi / mata pencaharian hidup, *keenam* sistem keagamaan, dan *ketujuh* kesenian.¹² Sistem bahasa merupakan bagian penting dari kebudayaan yang dapat diamati dan diteliti. Dalam kebudayaan Islam, seharusnya aspek kebahasaan menjadi salah satu kajian terpenting yang tidak boleh dilewatkan. Kajian tentang sistem bahasa Arab ini berfungsi untuk - salah satunya- mengetahui keindahan sastra Al-Qur'an. Tanpa pengetahuan tentang sistem bahasa Arab pada masa di mana Al-Qur'an diturunkan, maka akan sulit untuk memahami alasan mengapa para ahli syair pada zaman itu terkagum-kagum dengan

¹² Khazanah Antropologi 1, hlm. 57.

keindahan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga banyak yang masuk Islam karena alasan ini.

Sistem pengetahuan dalam sebuah kebudayaan sangat berhubungan dengan periodisasi zaman. Pengetahuan ibarat bola salju yang menggelinding melintasi garis waktu, semakin ke bawah bola salju tersebut semakin membesar. Pengetahuan orang pada zaman ini tentu sangat berbeda dengan orang zaman dulu karena perbedaan teknologi yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Pengetahuan masuk dalam salah satu unsur kebudayaan karena pengetahuan masyarakat sesuatu sudah tentu berhubungan dengan perilaku tertentu pada masyarakat tersebut. Dalam sejarah kebudayaan Islam, kita bisa mengambil contoh pengetahuan tentang takaran / timbangan. Dalam banyak hadis, takaran untuk berat benda selalu menggunakan ukuran *shaq* atau *watsaq*, hal ini disebabkan karena pengetahuan tentang takaran pada zaman itu belum berkembang seperti saat ini.

Sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan unsur penting lainnya dalam kebudayaan. Tanpa mengetahui sistem kekerabatan dalam masyarakat Arab pada periode awal Islam, mustahil kita mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang urgensi perlindungan Abu Thalib, paman nabi, kepada nabi selama hidupnya. Perlindungan Abu Thalib pada waktu itu sebenarnya bukan sekadar perlindungan fisik namun lebih kepada perlindungan hukum dan jaminan sosial yang dapat dilakukan karena dimungkinkan oleh sistem organisasi sosial pada waktu itu. Organisasi sosial

masyarakat Arab pada waktu itu dibagi menjadi suku dan kabilah-kabilah. Setiap kabilah dipimpin oleh seorang tokoh. Secara tradisional, apabila seorang tokoh dari sebuah suku memberikan jaminan keamanan kepada seseorang, maka dalam hukum saat itu apabila ada satu orang yang melanggarnya sanksi tidak hanya diberikan kepada orang tersebut, namun kepada seluruh anggota suku. Itulah mengapa sering terjadi perang antar suku karena alasan-alasan yang sangat sepele.

Selain itu, unsur kebudayaan lainnya adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Bagian ini masih sangat gelap dalam sejarah kebudayaan Islam. Hijrah yang dilakukan nabi pada waktu itu berangkat dari Mekah ke Yatrib dengan jarak tempuh sekitar 400 Kilometer. Jarak tersebut jika dilalui dengan alat transportasi waktu itu memerlukan waktu sekitar 14 sampai 20 hari. Tanpa pengetahuan tentang sistem transportasi yang ada saat itu, peristiwa hijrah akan dimaknai sebagai peristiwa yang "biasa-biasa saja". Padahal, hijrah adalah sebuah peristiwa besar yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa besar juga. Hijrah adalah perintah untuk meninggalkan kota kelahiran demi menjaga marwah agama, dari sebuah kota yang telah menjadi kota kelahiran tempat para sahabat tumbuh dan berkembang dari masa anak-anak hingga dewasa ke sebuah kota yang nun jauh di sana, yang belum jelas bagaimana kejelasan nasib mereka.

Sistem ekonomi dan mata pencaharian juga merupakan unsur sejarah yang kurang mendapatkan porsi yang memadai dalam sejarah kebudayaan Islam.

Mata pencaharian utama masyarakat kota Mekah pada zaman Islam adalah pada bidang perdagangan. Syam saat itu adalah pusat perniagaan internasional yang mempertemukan banyak pedagang dari China, Persia, dan Eropa.

Unsur terakhir dalam kebudayaan adalah kesenian. Ini juga merupakan bagian yang kurang tersentuh dalam sejarah kebudayaan Islam. Kesenian Arab pada masa sebelum dan setelah Islam sebenarnya cukup banyak, seperti nyanyi-nyanyian, seni tari, seni bahasa (syair), seni pahat (pembuatan patung), dan lain sebagainya. Bangsa Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kesenian. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari penghargaan yang tinggi terhadap syair-syair.

Di antara sarjana yang memiliki pandangan bahwa kata din merupakan kata yang memiliki makna khusus adalah Syed Muhammad Naquib Al Attas. Dia cenderung berpendapat bahwa istilah-istilah kunci yang ada di dalam sumber utama agama Islam, yaitu kitab suci Al-Qur`an dan hadis nabi, tidak bisa diterjemahkan kepada bahasa lain karena rawan terjadi reduksi makna. Untuk dapat memahami makna dari setiap istilah, maka istilah tersebut harus tetap menggunakan bahasa aslinya agar diperoleh pemahaman yang paling otentik dari istilah tersebut. Dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci yang berlaku untuk seluruh umat Islam, baik Arab atau non-Arab, memang merupakan hak Tuhan yang sifatnya *tauqifi*. Namun secara akademik, sudah pasti alasan mengapa bahasa Arab yang dipilih. Dalam hal

ini, Al Attas berpendapat bahwa bahasa Arab memiliki sifat ilmiah yang tidak ada pada bahasa lain.

Al Attas menghubungkan kata *din* dengan kata-kata lain dalam kategori sosial kebudayaan masyarakat Muslim, yaitu *dain* (hutang-piutang), *madinah* (kota), dan *tamaddun* (kebudayaan). Menurutnya, kata-kata tersebut saling berkaitan karena berasal dari asal kata yang sama. Lebih jauh, Al Attas menyimpulkan bahwa kata *din* dapat dijabarkan menjadi empat makna, yaitu (1) keberhutangan; (2) ketundukan; (3) kekuatan hukum; dan (4) kecenderungan alamiah.¹³ Dengan demikian, *din* memiliki konsep dan makna yang berbeda dengan istilah-istilah lain, seperti kata *religion* dalam bahasa Inggris.

Pertama, *din* memiliki makna keberhutangan, yaitu semacam kontrak antara manusia dengan Tuhan atas semua yang diberikan Tuhan kepada manusia. Konsep keberhutangan ini memberikan pengertian bahwa yang dimiliki oleh manusia hanya berupa titipan yang harus dikembalikan dan dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Manusia berhutang kepada Tuhan atas apa yang dititipkan kepadanya; jiwa, raga, waktu, kesempatan, kesehatan, harta, dan keluarga. Di dalam Islam, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh karenanya, semua yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya hanya merupakan barang pinjaman yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setiap hutang pasti memiliki tempo waktu. Demikian juga

¹³ Syed Muhammad Naquib Al Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1990), hlm. 5.

dengan semua yang dipinjam oleh manusia, jika telah tiba masanya, maka semua yang dipinjam tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sang Pemilik alam semesta ini.

Kedua, din memiliki makna ketundukan. Karena manusia terikat oleh kontrak "hutang piutang" dengan Tuhan, maka dengan sendirinya manusia harus tunduk dan patuh kepada aturan hutang piutang tersebut. Ketundukan terhadap aturan yang disepakati merupakan konsekuensi dari sebuah kontrak hutang piutang. Di dalam sebuah hadis terdapat gambaran tentang kehidupan setelah kematian dimana anggota tubuh manusia seperti tangan dan kaki akan bersaksi kepada Tuhan tentang apa yang pernah diperbuat oleh manusia dengannya. Karena kesaksian anggota tubuh tersebut berada di luar kontrol manusia, maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya anggota tubuh bukan milik manusia, melainkan hanya pinjaman saja.

Ketiga, din memiliki makna kekuatan hukum. Ajaran-ajaran di dalam Islam pada hakikatnya merupakan aturan-aturan kehidupan yang harus ditaati oleh pemeluknya. Setiap aturan memiliki sifat mengikat. Artinya, ketidaktaatan terhadap aturan-aturan tersebut dianggap sebagai perbuatan jahat yang berkonsekuensi mendapatkan hukuman. Di dalam Islam terdapat konsep pahala dan dosa, surga dan neraka. Manusia yang taat terhadap aturan-aturan Tuhan akan mendapatkan pahala dan dimasukkan ke surga. Sebaliknya, yang tidak taat akan mendapatkan dosa dan terancam masuk ke neraka. Adanya konsep pahala dan dosa ini

menunjukkan bahwa *din* mengandung pengertian kekuatan hukum.

Keempat, *din* memiliki makna kecenderungan alamiah. Barangkali ini yang paling membedakan pengertian *din* di dalam Islam dengan yang lain. Di dalam Islam, ruang lingkup agama tidak hanya hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan di tempat-tempat ibadah. Akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang merupakan kecenderungan alamiah (*fitrah*) manusia. Islam bukan hanya mengatur bagaimana cara salat, puasa, dan zakat, namun juga mengatur bagaimana membangun interaksi antar sesama manusia, bagaimana etika berpakaian, bagaimana etika makan dan minum, bahkan sampai etika berhubungan suami istri pun merupakan bagian yang diatur di dalam Islam. Semua hal itu merupakan kecenderungan alamiah manusia. Secara naluri, manusia membutuhkan makan dan minum, maka tata cara makan dan minum yang boleh dan tidak boleh atau yang baik dan kurang baik diatur oleh agama. Manusia membutuhkan sosialisasi dan bermasyarakat, maka agama mengatur tentang bagaimana sebaiknya membangun interaksi dalam masyarakat. Ruang lingkup agama di dalam Islam sebagaimana terkandung dalam kata *din* sangat luas, mencakup seluruh aspek kecenderungan alamiah manusia.

Pemaknaan *din* sebagai keberhutangan dan akad hutang piutang antara manusia dengan Tuhan diambil dari akar kata *din* itu sendiri yang menurut Al Attas memiliki kesamaan arti dengan kata *dana*

yang artinya berhutang. Dalam situasi dimana seseorang menemukan dirinya sedang berhutang (*da`in*) berarti dia mengendalikan dirinya sendiri, dalam pengertian kepatuhan dan sukarela, pada hukum dan peraturan pengaturan hutang-piutang, dan juga, pada satu sisi, kepada kreditor. Terdapat pula kandungan dalam situasi yang digambarkan tersebut fakta bahwa seseorang yang berhutang berada di bawah kewajiban, atau *dayn*. Ada dalam hutang di bawah kewajiban secara alamiah melibatkan pengadilan (*daynunah*), dan kesaksian (*idanah*), sebagaimana kasus tersebut.¹⁴ Pemaknaan *din* sebagai konsep hutang piutang ini selain karena berasal dari kata *dana*, juga dapat dipahami dari isi dan ajaran Islam sendiri yang menuntut pertanggungjawaban manusia atas semua yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya; hartanya, raganya, bahkan jiwanya, dan ini mengindikasikan bahwa semua itu sebenarnya bukan hak milik manusia melainkan hanya "dihutangkan" kepada manusia untuk dipergunakan dan dimanfaatkan yang nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban atas semua hutang tersebut.

Makna-makna yang terkandung dalam kata *din* ini lah yang membuat Al Attas merasa keberatan untuk menerjemahkannya ke dalam istilah-istilah dalam bahasa lain. Dengan demikian, agama dalam pengertian *din* sangat berbeda dari konsep agama yang dikembangkan di Barat, yang berhaluan sekuleristik. Barat mendefinisikan agama (*religion*) hanya sebagai keyakinan tentang Tuhan yang bersifat

¹⁴ Syed Naquib Al Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*,
20 | Fahri Hidayat

individu. Sedangkan, di dalam Islam, keberagamaan seseorang memiliki dimensi sosial. Sebab, pada akhirnya, aktualisasi dari keyakinan adalah pada moralitas yang dibuktikan di ruang publik dan berakumulasi pada lahirnya kebudayaan.

Agama di dalam konsepsi masyarakat Barat hanya tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga tidak berhubungan sama sekali dengan urusan keduniaan. Filsafat etika di dalam Barat hanya dibimbing oleh spekulasi logika dengan berbekal kapasitas intelektual manusia. Padahal, tidak akan ada kepastian dalam spekulasi filosofis dalam derajat yang sama dengan kepastian yang dibimbing oleh wahyu. Dimana peradaban Barat mengambil dari Yunani kuno unsur filosofis dan epistemologis dan fondasi pendidikan, etika, dan estetika; dan dari Romawi unsur hukum dan keahlian berpolitik dan pemerintahan; dari Yudaisme dan Kristinitas unsur kepercayaan terhadap agama; dan dari bangsa Latin independensi, jiwa kebangsaan, dan nilai tradisional.¹⁵

Di dalam agama Islam, interpretasi etika dan moralitas selain bersumber dari akal budi juga mengambil sumbernya dari kitab suci Al Qur`an, hadis, dan sunnah. Secara umum, etika dan moralitas dibagi menjadi substansi dan bentuk. Pedoman moralitas dalam Islam terkadang tidak mengatur pada tingkat bentuknya, karenanya bentuk dan ekspresi moralitas dimungkinkan berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang terdapat pada setiap wilayah meskipun substansinya sudah dibakukan

¹⁵ Syed Naquib Al Attas, *Prolegomena to the Methapysics of Islam*,

oleh agama. Misalnya, di dalam agama Islam terdapat perintah kepada anak muda untuk menghormati yang lebih tua. Substansinya adalah menghormati yang lebih tua. Akan tetapi bentuk ekspresinya pada ranah kebudayaan mungkin berbeda-beda, ekspresi penghormatan bisa ditunjukkan dengan mencium kening (Arab), menundukkan kepala (Indonesia), atau bahkan menundukkan tubuh sebagaimana ada dalam tradisi masyarakat Jawa.

Dengan demikian, agama dalam pengertian *din* sebenarnya kesatuan antara ajaran, keyakinan, dan kebudayaan. Keyakinan terhadap ajaran tersebut dibuktikan dengan lahirnya kebudayaan yang islami. Apabila konsep *din* di atas dilaksanakan dalam sebuah masyarakat yang terorganisir dalam sebuah tempat, maka tempat tersebut dinamakan *madinah*, atau tempat dilaksanakannya *din* (baca: pusat keagamaan). Di dalam sebuah *madinah*, tentu terdapat seorang pengatur dan pengelola (*dayyan*). Jadi, pada hakekatnya, *madinah* adalah sebuah konsep tentang kehidupan yang berkebudayaan (*tamaddun*); kehidupan sosial-hukum, tatanan, keadilan, dan otoritas. Jadi, agama (*din*) memiliki hubungan dengan pusat keagamaan (*madinah*) untuk membangun sebuah kebudayaan (*tamaddun*) yang dimanifestasikan dalam sebuah tatanan sosio-politik yang disebut *madinah*.

Karena agama Islam merupakan sumber ajaran berperilaku yang diikuti oleh pemeluknya, maka sulit untuk memisahkan agama Islam dengan kebudayaan. Perilaku yang dihasilkan secara kolektif oleh sebuah masyarakat yang didasari pada ketaatan terhadap

ajaran agamanya, pada hakikatnya merupakan sebuah kebudayaan. Agama Islam telah melahirkan banyak kebudayaan yang bercorak islami di seluruh dunia.

Selain itu, di dalam pengamatan seorang orientalis, Frederick M Denny, Islam sangat menekankan kepada aspek ritual yang disebut sebagai ibadah. Ritual tersebut, menurut Denny, merupakan ekspresi dari keyakinan seorang Muslim. Akan tetapi, ritual yang dilakukan oleh masyarakat Muslim ternyata tidak sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hal ini tidak dapat disimpulkan karena perbedaan mazhab fikih semata, akan tetapi juga karena terpengaruh oleh berbagai unsur budaya. Oleh karenanya, dalam meneliti tentang ritual-ritual di dalam Islam, Denny membaginya menjadi dua, yaitu ritual yang resmi dan ritual yang populer.

Ritual yang resmi adalah jenis ritual yang memang terdapat pada sumber-sumber Islam. Sedangkan ritual populer adalah ritual yang tidak ada pada sumber-sumber utama Islam, yaitu Al Quran dan hadis, namun berkembang pada masyarakat tertentu. Termasuk dalam kategori ini (ritual populer) adalah kultus terhadap individu yang diekspresikan dengan tradisi sesajen di makam orang yang dikultuskan tersebut. Dalam hal ini, Denny menulis:

Dalam satu kesempatan kuliah saya tentang praktek Islam, satu atau dua Muslim di kelas ingin menentang saya tentang satu hal yang sangat penting. "Itu bukan Islam yang sebenarnya, mengapa anda berbicara tentang hal ini di kelas?". Lalu saya bertanya bagaimana

yang sudah ada -bahkan sudah mapan- di masyarakat Arab. Interaksi tersebut pada akhirnya melahirkan dua bentuk reaksi, yaitu resistensi dan islamisasi. Resistensi yaitu penolakan total terhadap kebudayaan yang sudah ada yang disebabkan karena kebudayaan tersebut secara fundamental bertentangan dengan ajaran-ajaran inti Islam. Sedangkan islamisasi yaitu proses mengambil bentuk kebudayaan yang sudah ada dan mengganti isinya dengan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Terdapat banyak pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kebudayaan. Akan tetapi, dari banyak pendapat tersebut pada dasarnya memiliki satu kesamaan makna bahwa kebudayaan merupakan ide-ide yang tumbuh dalam sebuah masyarakat dan teraktualisasi menjadi sebuah perilaku. Sebagaimana dinyatakan oleh Koentjaraningrat bahwa:

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.... Kebudayaan (dibagi ~ pen) menjadi tiga wujud, yaitu pertama, kebudayaan sebagai sistem ide, kedua kebudayaan sebagai sistem aktivitas, dan ketiga kebudayaan sebagai sistem artefak.²⁰

Berangkat dari pengertian kebudayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setidaknya kebudayaan memiliki tiga lapisan, yaitu lapisan ide yang masih abstrak, lapisan perilaku yang merupakan bagian dari aktualisasi ide-ide abstrak tersebut menjadi aktivitas nyata, dan pada akhirnya berujung pada artefak atau

peninggalan-peninggalan fisik. Artefak merupakan benda-benda yang merupakan produk pikiran manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, artefak dalam pengertian ini tidak dibatasi pada benda-benda masa lampau yang ditemukan melalui penggalian arkeologis. Namun lebih pada pengertian benda-benda hasil pemikiran manusia seperti alat-alat, musik, seni tari, lagu, dan lain sebagainya. Pembagian kebudayaan menjadi tiga lapisan tersebut merupakan lapisan yang berjenjang. Artinya yang kedua ada karena yang pertama ada, dan yang ketiga ada karena adanya yang pertama dan kedua.

Islamisasi kebudayaan yang dimulai di tanah Arab dimulai dari islamisasi pada lapisan ide yang kemudian berimplikasi pada islamisasi perilaku dan pada akhirnya melahirkan artefak-artefak kebudayaan Islami di tanah Arab dan dunia Islam pada umumnya. Islamisasi kebudayaan yang dilakukan di tanah Arab tidak serta merta mengubah secara keseluruhan struktur kebudayaan yang sudah ada di tanah Arab sebelumnya.

Konsep *jahiliyah* yang digunakan untuk membedakan masyarakat Arab pra Islam dan setelah memeluk Islam sebenarnya tidak terkait dengan kebodohan dalam pengertian intelektualitas. Kata *jahiliyah* mengacu pada kebodohan kebudayaan, dimana terdapat sistem gagasan dan perilaku yang tidak sesuai dengan hakikat kebajikan. Perilaku membunuh anak perempuan di masyarakat Arab lahir karena ide kolektif masyarakat tersebut yang menganggap memandang perempuan sebagai makhluk yang rendah. Ide tersebut kemudian

melahirkan perilaku kolektif berupa pembunuhan anak perempuan karena memiliki anak perempuan dianggap sebagai hal yang memalukan. Terhadap masalah ini, islamisasi kebudayaan dilakukan pada dua lapisan. Pada lapisan ide, islam mengubah secara fundamental pandangan dasar terhadap wanita dari makhluk hina menjadi makhluk yang sangat mulia. Pada lapisan perilaku islamisasi dilakukan dengan melarang perbuatan saling membunuh.

Sejak masa pra Islam, masyarakat Arab sebenarnya merupakan masyarakat yang sudah berkebudayaan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari tiga hal. *Pertama*, masyarakat Arab memiliki keahlian memahat patung. Patung-patung yang dipahat sebagian besar merupakan patung orang-orang yang dianggap saleh untuk dijadikan sesembahan. Ketrampilan memahat dan mengukir patung sudah tentu tidak lahir dari masyarakat yang memiliki inteletualitas rendah. *Kedua*, masyarakat Arab memiliki tradisi membuat syair. Syair merupakan hasil sastra dan keindahan bahasa. Pada zaman dahulu, setiap suku atau kabilah di tanah Arab akan sangat bangga ketika di sukunya terdapat penyair yang terkenal. Bahkan, ka'bah pada masa itu digunakan untuk menempel syair-syair yang dianggap baik. Tradisi yang menjunjung tinggi karya sastra semacam ini hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berkebudayaan. *Ketiga*, mata pencaharian masyarakat Arab pra Islam adalah berdagang. Mereka menjual dagangan mereka di negeri Syam. Sebuah negeri non Arab yang letaknya sangat jauh dari kota Mekah.

Sistem ide yang melandasi pembuatan patung-patung dewa di kalangan masyarakat Arab adalah pemahaman bahwa Tuhan merupakan sesuatu yang transenden, yang tidak terjangkau oleh manusia, yang oleh karenanya manusia harus menggunakan perantara-perantara untuk memohon kepada Tuhan. Perantara yang dimaksud ada dua, yaitu malaikat dan orang-orang yang dianggap saleh. Oleh karenanya, mereka memahat patung-patung, di antara yang terkenal adalah patung Latta, Uzza, Manat, dan Hubal.

Latta adalah seorang laki-laki yang menumbuk tepung bagi para jamaah haji.²¹ Karena kebaikan hatinya, maka orang-orang memahat patung sebagai monumen untuk mengenang kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Adapun Uzza adalah sebuah pohon yang dinaungi bangunan dari tirai dari daerah Nikhlah yang terletak di antara Mekah dan Thaif.²² Sedangkan Manat adalah patung yang berada di daerah Qadid, terletak di antara Mekah dan Madinah.

Islamisasi yang dilakukan oleh nabi Muhammad dalam hal tersebut adalah meluruskan ide tentang Tuhan yang pada mulanya dipahami sebagai Dzat yang harus diibadahi melalui perantara-perantara menjadi pemahaman tauhid, yaitu keesaan Tuhan dan pembersihan dari semua perantara-perantara peribadatan kepadaNya. Pada lapisan perilaku, Islam melarang memahat patung-patung makhluk bernyawa

²¹ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9, (Jakarta, Pustaka Imam Syafii: 2017), hlm. 232.

²² *Ibid.*, hlm 232.

seperti malaikat, manusia, atau bahkan binatang-binatang karena dikhawatirkan patung-patung tersebut akan dijadikan sesembahan-sesembahan.

Dalam bidang sastra, masyarakat Arab memiliki kebiasaan membuat syair-syair. Akan tetapi, syair-syair yang dibuat pada saat itu banyak yang mengandung hal-hal negatif. Syair yang berisi provokasi perang dan pornografi merupakan syair-syair yang sangat dominan pada saat itu. Islamisasi kebudayaan dalam hal ini tidak menghapus tradisi syairnya, namun mengislamisasi isi dari syair-syair tersebut. Tradisi pembuatan syair tetap dipertahankan akan tetapi syair-syair yang diproduksi paska Islam adalah syair-syair yang baik, yang mengajak kepada hal-hal yang islami.

Dalam praktik perdagangan, meskipun sistem perdagangan yang telah dilakukan oleh masyarakat Arab sudah sangat maju, akan tetapi di dalam praktik perdagangan tersebut terdapat banyak perilaku yang merusak dan merugikan orang lain seperti praktik riba dan perilaku curang dalam timbangan. Dalam hal ini, islamisasi kebudayaan dilakukan dengan melarang praktik-praktik merusak tersebut.

Islamisasi kebudayaan dalam konteks keindonesiaan terjadi pada hampir semua bentuk kebudayaan Islam yang ada saat ini. Institusi pendidikan Islam yang paling tua dan sudah berkembang jauh sebelum lahirnya institusi negara Indonesia, yaitu pondok pesantren, merupakan contoh nyata hasil dari islamisasi kebudayaan di nusantara. Santri dan Pesantren yang saat ini menjadi kosakata agama Islam, dulunya merupakan

lembaga untuk mengajarkan kitab-kitab Hindu. Istilah santri sendiri tidak ditemukan dalam bahasa Arab.

Menurut Karel A Steenbrink, istilah pesantren sebagai nama lembaga pendidikan agama, dan istilah mengaji sebagai aktifitas di lembaga tersebut bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari India.²³ Sedangkan, istilah pondok bisa saja berasal dari kata Arab yaitu *funduq* yang berarti penginapan. Meskipun demikian, kata *funduq* sendiri tidak digunakan di dalam bahasa Arab sebagai nama lembaga pendidikan. Dengan demikian, meskipun kata pondok diadaptasi dari bahasa Arab, namun tetap saja penggunaan istilah tersebut merupakan lokalisasi dan adaptasi yang disesuaikan dengan lokalitas kebudayaan nusantara.

Lebih jauh lagi, Steenbrink mengutip pendapat Soegarda Poerbakawatja yang menguatkan asal usul pesantren dari India. Ada beberapa alasan yang menguatkan indikasi relasi kultural pesantren sebagai lembaga agama Islam khas Indonesia dengan lembaga pendidikan agama Hindu di India, yaitu *pertama*, seluruh sistem pendidikannya bersifat agama, *kedua* guru tidak mendapatkan gaji, *ketiga* penghormatan yang besar kepada guru, dan *keempat* murid yang pergi meminta-minta (mencari donatur) ke luar lingkungan pondok.²⁴

Dalam sebuah penelitian, ditemukan fakta bahwa terdapat lebih dari dua ribu kosakata Arab

²³ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 21.

²⁴ Karel A. Steenbrink, hlm. 21.

yang telah masuk ke dalam bahasa Melayu. Bahasa adalah organ penting kebudayaan. Dengan masuknya konsep dan ide-ide Islam ke dalam bahasa Melayu artinya islamisasi sudah masuk ke jantung kebudayaan. Banyak istilah dalam istilah ketatanegaraan Indonesia saat ini merupakan akulturasi dari bahasa Arab. Misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Kata 'majelis' jelas-jelas merupakan kata bahasa Arab yang bahkan maknanya masih tetap sama dengan kata aslinya. Kata *al-majlis* dalam bahasa Arab saat ini digunakan untuk menyebut semacam badan organisasi. Permusyawaratan merupakan perubahan bentuk dari *al-musyawah* yang dalam bahasa Arab berarti bertukar pendapat untuk memutuskan sesuatu.

Kata "rakyat" yang berarti penduduk sebuah wilayah merupakan adaptasi dari kata *ro'iyah* yang berarti "yang digembala". Kata *roiyah* sendiri muncul dalam sebuah hadis nabi : "Setiap kalian adalah *ra'in* (penggembala / baca: pemimpin) dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban atas *roiyah*-nya (gembalaannya/ yang dipimpin). Substansi dari hadis tersebut adalah penekanan tentang besarnya tanggungjawab seorang pemimpin. Di sini, yang dimaksud dengan pemimpin tidak dibatasi hanya pada sektor formal, namun merujuk pada makna kepemimpinan yang luas. Setiap pemimpin diwajibkan pertanggungjawab kepada Allah tentang semua yang menjadi tanggungjawab kepemimpinannya.

Menariknya, konsep “rakyat” yang diambil dari kata *ra`iyah*, dimana kata *ra`iyah* sendiri merupakan filosofi yang diambil dari hadis nabi Muhammad tentang kepemimpinan, justru tidak digunakan di negara-negara Arab dalam percakapan sehari-hari atau dalam peristilahan yang ada. Orang-orang Arab menyebut penduduk negara atau orang yang mendiami sebuah wilayah dengan sebutan *`ahlu*. Penduduk mesir disebut *`ahlu misr*, penduduk Saudi disebut dengan *`ahlu su`udiyah*, dan seterusnya. Artinya, konsep “rakyat” sebenarnya merupakan produk islamisasi, bukan arabisasi, dan merupakan produk islamisasi kebudayaan yang secara otentik dirumuskan oleh para sarjana, cendekiawan, ulama dan intelektual Melayu - Nusantara.

Islamisasi kebudayaan bukan merupakan proses statis yang berhenti di masa lampau, proses ini terus berjalan seiring dengan semakin religiusnya masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam pengertian yang terakhir, islamisasi tidak hanya diartikan sebagai proses masuknya seseorang ke dalam agama Islam, tapi juga proses seseorang menjadi lebih dekat dengan ajaran-ajaran Islam dalam perilaku kesehariannya.

Lahirnya era reformasi yang membuka kran kebebasan memberikan implikasi pada banyak hal, termasuk pada perkembangan Islam di Indonesia. Jika pada era sebelumnya kebebasan berpendapat benar-benar dibatasi, pada era reformasi semua pemikiran, ide, dan gagasan yang tumbuh dan

berkembang dari “arus bawah” menemukan momentum untuk berkembang di ruang publik.²⁵

Selaras dengan itu, kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat juga turut mengalami islamisasi. Untuk menyebut beberapa contoh, trend jilbab dan busana muslim yang saat ini semakin menjamur, dua dekade sebelum ini fenomena tersebut belum terjadi. Dua puluh tahun yang lalu, belum banyak wanita muslim yang mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka tetap melaksanakan ajaran islam yang lain seperti salat dan puasa. Artinya, semakin ke sini, masyarakat Indonesia semakin religius, semakin taat dalam beragama. Ini merupakan proses islamisasi, atau semakin islam-nya masyarakat Indonesia.

Gedung-gedung bioskop pada era tahun 80-nan dipersepsikan sebagai tempat hiburan yang tidak ramah anak karena biasanya film-film yang diputar merupakan film-film dewasa. Banyak orang tua pada masa itu yang melarang anaknya menonton film di bioskop. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, islamisasi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia juga menembus dinding-dinding gedung bioskop dan mengubahnya menjadi panggung kebudayaan islami. Film-film yang diputar di gedung bioskop saat ini banyak yang bernuansa islami.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama Islam dapat berinteraksi secara harmoni dengan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari interaksi tersebut adalah

²⁵ Fahri Hidayat, “Pertumbuhan Ideologi Pendidikan di Era Reformasi”, Jurnal Literasi, Vol berapa.

islamisasi kebudayaan, yaitu suatu bentuk akulturasi nilai-nilai islam dengan ide kebudayaan lain yang sudah mapan. Hasil akhir dari proses islamisasi kebudayaan tidak selalu menggunakan simbol-simbol islam.

Meskipun agama Islam menghasilkan sebuah kebudayaan, akan tetapi agama Islam lahir dan tumbuh di tengah masyarakat Arab yang sudah memiliki sebuah kebudayaan. Di sini terjadi interaksi antara ajaran-ajaran agama Islam dengan kebudayaan yang sudah ada -bahkan sudah mapan- di masyarakat Arab. Interaksi tersebut pada akhirnya melahirkan dua bentuk reaksi, yaitu resistensi dan islamisasi. Resistensi yaitu penolakan total terhadap kebudayaan yang sudah ada yang disebabkan karena kebudayaan tersebut secara fundamental bertentangan dengan ajaran-ajaran inti Islam. Sedangkan islamisasi yaitu proses mengambil bentuk kebudayaan yang sudah ada dan mengganti isinya dengan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Terdapat banyak pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kebudayaan. Akan tetapi, dari banyak pendapat tersebut pada dasarnya memiliki satu kesamaan makna bahwa kebudayaan merupakan ide-ide yang tumbuh dalam sebuah masyarakat dan teraktualisasi menjadi sebuah perilaku. Sebagaimana dinyatakan oleh Koentjaraningrat bahwa:

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.... Kebudayaan (dibagi ~ pen) menjadi tiga wujud, yaitu pertama,

*kebudayaan sebagai sistem ide, kedua kebudayaan sebagai sistem aktivitas, dan ketiga kebudayaan sebagai sistem artefak.*²⁶

Berangkat dari pengertian kebudayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setidaknya kebudayaan memiliki tiga lapisan, yaitu lapisan ide yang masih abstrak, lapisan perilaku yang merupakan bagian dari aktualisasi ide-ide abstrak tersebut menjadi aktivitas nyata, dan pada akhirnya berujung pada artefak atau peninggalan-peninggalan fisik. Artefak merupakan benda-benda yang merupakan produk pikiran manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, artikel dalam pengertian ini tidak dibatasi pada benda-benda masa lampau yang ditemukan melalui penggalian arkeologis. Namun lebih pada pengertian benda-benda hasil pemikiran manusia seperti alat-alat, musik, seni tari, lagu, dan lain sebagainya. Pembagian kebudayaan menjadi tiga lapisan tersebut merupakan lapisan yang berjenjang. Artinya yang kedua ada karena yang pertama ada, dan yang ketiga ada karena adanya yang pertama dan kedua.

Islamisasi kebudayaan yang dimulai di tanah Arab dimulai dari islamisasi pada lapisan ide yang kemudian berimplikasi pada islamisasi perilaku dan pada akhirnya melahirkan artefak-artefak kebudayaan Islami di tanah Arab dan dunia Islam pada umumnya. Islamisasi kebudayaan yang dilakukan di tanah Arab tidak serta merta mengubah secara keseluruhan struktur kebudayaan yang sudah ada di tanah Arab sebelumnya.

Konsep *jahiliyah* yang digunakan untuk membedakan masyarakat Arab pra Islam dan setelah memeluk Islam sebenarnya tidak terkait dengan kebodohan dalam pengertian intelektualitas. Kata *jahiliyah* mengacu pada kebodohan kebudayaan, dimana terdapat sistem gagasan dan perilaku yang tidak sesuai dengan hakikat kebajikan. Perilaku membunuh anak perempuan di masyarakat Arab lahir karena ide kolektif masyarakat tersebut yang menganggap memandang perempuan sebagai makhluk yang rendah. Ide tersebut kemudian melahirkan perilaku kolektif berupa pembunuhan anak perempuan karena memiliki anak perempuan dianggap sebagai hal yang memalukan. Terhadap masalah ini, islamisasi kebudayaan dilakukan pada dua lapisan. Pada lapisan ide, islam mengubah secara fundamental pandangan dasar terhadap wanita dari makhluk hina menjadi makhluk yang sangat mulia. Pada lapisan perilaku islamisasi dilakukan dengan melarang perbuatan saling membunuh.

Sejak masa pra Islam, masyarakat Arab sebenarnya merupakan masyarakat yang sudah berkebudayaan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari tiga hal. *Pertama*, masyarakat Arab memiliki keahlian memahat patung. Patung-patung yang dipahat sebagian besar merupakan patung orang-orang yang dianggap saleh untuk dijadikan sesembahan. Ketrampilan memahat dan mengukir patung sudah tentu tidak lahir dari masyarakat yang memiliki intelektualitas rendah. *Kedua*, masyarakat Arab memiliki tradisi membuat syair. Syair merupakan hasil sastra dan keindahan bahasa. Pada zaman

dahulu, setiap suku atau kabilah di tanah Arab akan sangat bangga ketika di sukunya terdapat patung-patung yang terkenal. Hal ini, kearah pada masa itu dipandang untuk menampung syair-syair yang dianggap baik. Tradisi yang menjunjung tinggi karya sastra semacam ini hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berkebudayaan. Ketiga, mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam adalah berdagang. Mereka menjual dagangan mereka di negeri Syam. Sebuah negeri non Arab yang letaknya sangat jauh dari kota Mekah.

Sistem ide yang melandasi pembuatan patung-patung dewa di kalangan masyarakat Arab adalah pemahaman bahwa Tuhan merupakan sesuatu yang transenden, yang tidak terjangkau oleh manusia, yang oleh karenanya manusia harus menggunakan perantara-perantara untuk memohon kepada Tuhan. Perantara yang dimaksud ada dua, yaitu malaikat dan orang-orang yang dianggap saleh. Oleh karenanya, mereka memahat patung-patung, di antara yang terkenal adalah patung Latta, Uzza, Manat, dan Hubal.

Latta adalah seorang laki-laki yang menumbuk tepung bagi para jamaah haji.²⁷ Karena kebaikan hatinya, maka orang-orang memahat patung sebagai monumen untuk mengenang kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Adapun Uzza adalah sebuah pohon yang dinaungi bangunan dari tirai dari daerah Mikhlah yang terletak di antara Mekah dan

Thaif.²⁸ Sedangkan Manat adalah patung yang berada di daerah Qadid, terletak di antara Mekah dan Madinah.

Islamisasi yang dilakukan oleh nabi Muhammad dalam hal tersebut adalah meluruskan ide tentang Tuhan yang pada mulanya dipahami sebagai Dzat yang harus diibadahi melalui perantara-perantara menjadi pemahaman tauhid, yaitu keesaan Tuhan dan pembersihan dari semua perantara-perantara peribadatan kepadaNya. Pada lapisan perilaku, Islam melarang memahat patung-patung makhluk bernyawa seperti malaikat, manusia, atau bahkan binatang-binatang karena dikhawatirkan patung-patung tersebut akan dijadikan sesembahan-sesembahan.

Dalam bidang sastra, masyarakat Arab memiliki kebiasaan membuat syair-syair. Akan tetapi, syair-syair yang dibuat pada saat itu banyak yang mengandung hal-hal negatif. Syair yang berisi provokasi perang dan pornografi merupakan syair-syair yang sangat dominan pada saat itu. Islamisasi kebudayaan dalam hal ini tidak menghapus tradisi syairnya, namun mengislamisasi isi dari syair-syair tersebut. Tradisi pembuatan syair tetap dipertahankan akan tetapi syair-syair yang diproduksi paska Islam adalah syair-syair yang baik, yang mengajak kepada hal-hal yang islami.

Dalam praktik perdagangan, meskipun sistem perdagangan yang telah dilakukan oleh masyarakat Arab sudah sangat maju, akan tetapi di dalam praktik perdagangan tersebut terdapat banyak perilaku yang merusak dan merugikan orang lain seperti praktik

²⁸ *Ibid.*, hlm 232.

riba dan perilaku curang dalam timbangan. Dalam hal ini, islamisasi kebudayaan dilakukan dengan melarang praktik-praktik merusak tersebut.

Islamisasi kebudayaan dalam konteks keindonesiaan terjadi pada hampir semua bentuk kebudayaan Islam yang ada saat ini. Institusi pendidikan Islam yang paling tua dan sudah berkembang jauh sebelum lahirnya institusi negara Indonesia, yaitu pondok pesantren, merupakan contoh nyata hasil dari islamisasi kebudayaan di nusantara. Santri dan Pesantren yang saat ini menjadi kosakata agama Islam, dulunya merupakan lembaga untuk mengajarkan kitab-kitab Hindu. Istilah santri sendiri tidak ditemukan dalam bahasa Arab.

Menurut Karel A Steenbrink, istilah pesantren sebagai nama lembaga pendidikan agama, dan istilah mengaji sebagai aktifitas di lembaga tersebut bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari India.²⁹ Sedangkan, istilah pondok bisa saja berasal dari kata Arab yaitu *funduq* yang berarti penginapan. Meskipun demikian, kata *funduq* sendiri tidak digunakan di dalam bahasa Arab sebagai nama lembaga pendidikan. Dengan demikian, meskipun kata pondok diadaptasi dari bahasa Arab, namun tetap saja penggunaan istilah tersebut merupakan lokalisasi dan adaptasi yang disesuaikan dengan lokalitas kebudayaan nusantara.

Lebih jauh lagi, Steenbrink mengutip pendapat Soegarda Poerbakawatja yang menguatkan asal usul

²⁹ Kareel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 21.

pesantren dari India. Ada beberapa alasan yang menguatkan indikasi relasi kultural pesantren sebagai lembaga agama Islam khas Indonesia dengan lembaga pendidikan agama Hindu di India, yaitu *pertama*, seluruh sistem pendidikannya bersifat agama, *kedua* guru tidak mendapatkan gaji, *ketiga* penghormatan yang besar kepada guru, dan *keempat* murid yang pergi meminta-minta (mencari donatur) ke luar lingkungan pondok.³⁰

Dalam sebuah penelitian, ditemukan fakta bahwa terdapat lebih dari dua ribu kosakata Arab yang telah masuk ke dalam bahasa Melayu. Bahasa adalah organ penting kebudayaan. Dengan masuknya konsep dan ide-ide Islam ke dalam bahasa Melayu artinya islamisasi sudah masuk ke jantung kebudayaan. Banyak istilah dalam istilah ketatanegaraan Indonesia saat ini merupakan akulturasi dari bahasa Arab. Misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Kata 'majelis' jelas-jelas merupakan kata bahasa Arab yang bahkan maknanya masih tetap sama dengan kata aslinya. Kata *al-majlis* dalam bahasa Arab saat ini digunakan untuk menyebut semacam badan organisasi. Permusyawaratan merupakan perubahan bentuk dari *al-musyawah* yang dalam bahasa Arab berarti bertukar pendapat untuk memutuskan sesuatu.

Kata "rakyat" yang berarti penduduk sebuah wilayah merupakan adaptasi dari kata *ro'iyah* yang berarti "yang digembala". Kata *roiyah* sendiri muncul dalam sebuah hadis nabi : "Setiap kalian adalah ra'in

³⁰ Kareel A. Stenbrink, hlm. 21.

(penggembala / baca: pemimpin) dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban atas roiyah-nya (gembalaannya/ yang dipimpin). Substansi dari hadis tersebut adalah penekanan tentang besarnya tanggungjawab seorang pemimpin. Di sini, yang dimaksud dengan pemimpin tidak dibatasi hanya pada sektor formal, namun merujuk pada makna kepemimpinan yang luas. Setiap pemimpin diwajibkan pertanggungjawab kepada Allah tentang semua yang menjadi tanggungjawab kepemimpinannya.

Menariknya, konsep "rakyat" yang diambil dari kata *ra`iyah*, dimana kata *ra`iyah* sendiri merupakan filosofi yang diambil dari hadis nabi Muhammad tentang kepemimpinan, justru tidak digunakan di negara-negara Arab dalam percakapan sehari-hari atau dalam peristilahan yang ada. Orang-orang Arab menyebut penduduk negara atau orang yang mendiami sebuah wilayah dengan sebutan *`ahlu*. Penduduk mesir disebut *`ahlu misr*, penduduk Saudi disebut dengan *`ahlu su`udiyah*, dan seterusnya. Artinya, konsep "rakyat" sebenarnya merupakan produk islamisasi, bukan arabisasi, dan merupakan produk islamisasi kebudayaan yang secara otentik dirumuskan oleh para sarjana, cendekiawan, ulama dan intelektual Melayu - Nusantara.

Islamisasi kebudayaan bukan merupakan proses statis yang berhenti di masa lampau, proses ini terus berjalan seiring dengan semakin religiusnya masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam pengertian yang terakhir, islamisasi tidak hanya diartikan sebagai proses masuknya seseorang ke dalam agama

Islam, tapi juga proses seseorang menjadi lebih dekat dengan ajaran-ajaran Islam dalam perilaku kesehariannya.

Lahirnya era reformasi yang membuka kran kebebasan memberikan implikasi pada banyak hal, termasuk pada perkembangan Islam di Indonesia. Jika pada era sebelumnya kebebasan berpendapat benar-benar dibatasi, pada era reformasi semua pemikiran, ide, dan gagasan yang tumbuh dan berkembang dari "arus bawah" menemukan momentum untuk berkembang di ruang publik.³¹

Selaras dengan itu, kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat juga turut mengalami islamisasi. Untuk menyebut beberapa contoh, trend jilbab dan busana muslim yang saat ini semakin menjamur, dua dekade sebelum ini fenomena tersebut belum terjadi. Dua puluh tahun yang lalu, belum banyak wanita muslim yang mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka tetap melaksanakan ajaran islam yang lain seperti salat dan puasa. Artinya, semakin ke sini, masyarakat Indonesia semakin religius, semakin taat dalam beragama. Ini merupakan proses islamisasi, atau semakin islam-nya masyarakat Indonesia.

Gedung-gedung bioskop pada era tahun 80-nan dipersepsikan sebagai tempat hiburan yang tidak ramah anak karena biasanya film-film yang diputar merupakan film-film dewasa. Banyak orang tua pada masa itu yang melarang anaknya menonton film di bioskop. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya

³¹ Fahri Hidayat, "Pertumbuhan Ideologi Pendidikan di Era Reformasi", Jurnal Literasi, Vol berapa.

waktu, islamisasi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia juga menembus dinding-dinding gedung bioskop dan mengubahnya menjadi panggung kebudayaan islami. Film-film yang diputar di gedung bioskop saat ini banyak yang bernuansa islami.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama Islam dapat berinteraksi secara harmoni dengan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari interaksi tersebut adalah islamisasi kebudayaan, yaitu suatu bentuk akulturasi nilai-nilai islam dengan ide kebudayaan lain yang sudah mapan. Hasil akhir dari proses islamisasi kebudayaan tidak selalu menggunakan simbol-simbol islam.

Istilah gerakan sosial (*social movement*) dalam kajian sosiologi biasa dikaitkan dengan gerakan massa yang memiliki tujuan politis. Peristiwa *Arab Spring* yang meletus di Aljazair sejak 2011 dan masih berlangsung hingga saat ini merupakan contoh gerakan sosial dan keagamaan yang massif. Gerakan-gerakan ini muncul sebagai respons kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap gagal memberikan kesejahteraan ekonomi.

Di Indonesia, tumbanganya pemerintahan orde baru pada 1998 tidak dapat dilepaskan dari munculnya gerakan sosial, khususnya dari kalangan mahasiswa yang lantang menyuarakan tuntutan reformasi. Gerakan sosial ini meletus karena adanya pertemuan antara krisis ekonomi, otoritarianisme, ketidaksenangan massa kepada rezim orde baru yang dianggap terlalu represif.

Secara teoritik, gerakan sosial dibedakan dari gerakan-gerakan sejenis seperti kerumunan, kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Menurut Singh³², kerumunan dan kerusuhan merupakan aksi massa yang tidak terorganisir dan bersifat spontan. Bedanya, kerusuhan dicirikan dengan adanya kekerasan, sedangkan kerumunan tidak menggunakan kekerasan. Pemberontakan dan revolusi merupakan aksi massa yang terencana dan terorganisasi dengan tujuan menentang tatanan politik yang ada. Bedanya, pemberontakan hanya bersifat penolakan tanpa ada tendensi mengganti tatanan yang ada, sedangkan revolusi memiliki tujuan mengganti tatanan politik yang ada dengan tatanan politik yang baru.

Ada banyak pendapat yang menjelaskan tentang pengertian gerakan sosial, di antaranya yaitu pendapat yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah *"mobilisasi untuk menentang negara dan sistem pemerintahannya yang tidak selalu menggunakan kekerasan dan pemberontakan bersenjata sebagaimana terjadi kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi."*³³

Dengan demikian, ada beberapa ciri dari gerakan sosial, *pertama* merupakan mobilisasi massa yang direncanakan, *kedua*, tidak selalu menggunakan aksi-aksi kekerasan, dan *ketiga* memiliki tujuan politis. Yang dimaksud dengan mobilisasi massa yaitu ketika seseorang berhasil mengkondisikan banyak orang supaya memiliki pemikiran, ide, dan cita-cita

³² Rajendra Singh, "Social Movement Old and New: a Post-Modernist Critique" dalam Dimpos Manalu, "Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik", Jurnal Populasi, No 18 Volume 1, 2007, hlm. 31-32.

³³ Ibid, hlm. 33.

yang sama. Memobilisasi massa tidak harus dalam bentuk kasat mata seperti mengumpulkan banyak orang di lapangan, atau mengajak mereka turun di jalan untuk demonstrasi. Memobilisasi massa dapat dilakukan dengan bentuk yang tidak terlihat, yaitu menyamakan ide dan cita-cita banyak orang tentang agenda yang sama.

Adapun, yang dimaksud dengan 'tujuan politik' tidak selalu berarti politik praktis. Politik memiliki makna yang luas sebagai sebuah siasat untuk mencapai sebuah tujuan. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, lalu dia membuat rencana dan siasat agar yang diinginkan tersebut dapat diraihinya, maka sebenarnya dia sedang berpolitik. Jadi, 'tujuan politik' dalam pengertian gerakan sosial tidak selalu dihubungkan dengan kekuasaan politik. Meskipun dalam banyak kasus 'tujuan politik' di sini banyak juga yang dimaknai sebagai tendensi merebut kekuasaan.

Ada tiga hal penting yang menentukan keberhasilan gerakan sosial, *pertama* struktur kesempatan politik, *kedua*, struktur mobilisasi, dan *ketiga* pembingkai aksi /*framing*.³⁴ Kesempatan politik menjadi pintu pertama yang memungkinkan munculnya gerakan sosial. Dalam banyak kasus, seperti dalam kasus *Arab Spring*, atau reformasi 1998, kesempatan politik ini muncul karena pemegang otoritas yang sedang berkuasa dalam kondisi lemah. Kondisi lemahnya sebuah pemerintahan biasanya

³⁴ Noorhaidi Hasan, Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas Disiplin, Jurnal Al Jami'ah, Vol. 44, No.1, 2006, hlm. 245.

menjadi momentum bagi kelompok-kelompok yang tidak sehaluan dengan pemerintah untuk menghimpun rakyat dalam gerakan sosial menentang pemerintahan.

Selain kesempatan politik, struktur mobilisasi juga menjadi variabel penting dalam keberhasilan sebuah gerakan sosial. Struktur mobilisasi di sini diartikan sebagai cara para founder gerakan sosial menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan massa. Dalam hal ini, citra personal seorang figur menjadi penting. Biasanya, gerakan sosial membutuhkan seorang figur yang dijadikan sebagai simbol perjuangan. Selain itu, figur tersebut juga harus mampu menjadi representasi ide-ide dan gagasan yang diperjuangkan oleh massa. Dalam kasus reformasi 1998 di Indonesia, figur tersebut di antaranya adalah Amin Rais. Ia selain menjadi simbol berlawanan juga dipandang sebagai antitesis pemerintah yang mewakili kelompok massa yang pada saat itu melakukan demonstrasi.

Framming atau pembedaan aksi menjadi variabel lain yang juga menentukan keberhasilan gerakan sosial. *Framming* bisa juga dimaknai sebagai manajemen isu, yaitu bagaimana para elite yang memobilisasi gerakan sosial membangun isu yang meyakinkan massa agar mau bergabung dalam gerakan sosial. Isu tersebut harus merupakan isu yang mampu menyatukan banyak orang. Gerakan 411 dan 212 yang muncul pada pilkada DKI, misalnya, gerakan ini berhasil menghimpun massa dalam jumlah besar karena berhasil membedai gerakan tersebut dengan dogma agama.

Menurut Tarrow, tidak semua gerakan kolektif bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial. Menurutnya, gerakan sosial harus memenuhi empat unsur yaitu *pertama* tantangan kolektif, *kedua* tujuan bersama, *ketiga* solidaritas dan identitas kolektif, dan *keempat* memelihara politik lawan.³⁵ Empat unsur tersebut ada di dalam gerakan 411 dan 211. Pertama, massa yang terhimpun di dalam gerakan 411 dan 212 memiliki tantangan bersama yaitu 'melengserkan' kepemimpinan petahana yang bukan hanya dianggap sebagai musuh politik, namun juga 'musuh' agama. Kedua, massa tersebut juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mendudukkan gubernur yang seiman dengan mereka di ibu kota. Ketiga, bisa dikatakan, massa yang terhimpun di dalam gerakan 212 memiliki identitas tunggal, yaitu identitas muslim. Keempat, selama kampanye berlangsung, massa 212 secara konsisten memelihara isu-isu agama sehingga berhasil menyatukan sentimen publik secara luas. Dengan demikian, aksi 212 dan organisasi 212 yang lahir kemudian dalam hal ini memenuhi semua unsur untuk disebut sebagai gerakan sosial.

Kajian tentang gerakan sosial menurut Mansoer Fakhri dibagi menjadi dua sudut pandang. Sudut pandang pertama melihat gerakan sosial sebagai semacam "penyakit" yang tumbuh di tengah kemapanan masyarakat. Sedangkan sudut pandang kedua justru memandang gerakan sosial sebagai sebuah fenomena positif karena merupakan manifestasi ide-ide kolektif sebuah kelompok

³⁵ Sidney Tarrow dalam Suharko, "Gerakan Sosial Baru di Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 10, No 1, Juli 2006, hlm. 6.

masyarakat.³⁶ Sudah tentu, sudut pandang pertama merupakan sudut pandang pemerintah yang sedang berkuasa. Bagaimanapun, gerakan-gerakan semacam ini menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah pemerintah. Sebab, meskipun mungkin gerakan sosial tidak sampai pada tingkat mengulingkan kekuasaan, namun setidaknya mereka telah berhasil menggerus legitimasi kekuasaan pemerintah di mata sebagian rakyatnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial merupakan mobilisasi massa yang dilakukan oleh seorang aktor, yang memiliki tujuan bersama, yang dilakukan secara sadar dan terencana, dan dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap sebuah sistem, tatanan, atau kondisi sosial tertentu di sebuah masyarakat.

Dengan mendudukan konsep agama, kebudayaan, dan gerakan sosial sebagaimana dijelaskan pada sub bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya ketiga hal tersebut merupakan tiga hal yang saling berhubungan. Agama memiliki dimensi kebudayaan sekaligus gerakan sosial.

Agama memiliki hubungan timbal balik dengan kebudayaan. Agama membentuk suatu kebudayaan, sedangkan kebudayaan yang sudah ada sebelum lahirnya agama juga mengubah bentuk asli agama

³⁶ Mansoer Fakhri dalam Idlil Akbar, "Demokrasi dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa terhadap Dinamika Perubahan Sosial)", Jurnal Wacana Politik, Vol 1 No. 2 Oktober 2016,

yang baru datang.³⁷ Di dalam sejarah nusantara, tradisi-tradisi yang pada mulanya merupakan tradisi Hindu Jawa, seperti empat bulanan dan tujuh bulanan untuk memperingati kehamilan, pada akhirnya diakuisisi menjadi bentuk baru dari praktik kebudayaan Islam. Keyakinan agama menjadi dasar dibangunnya situs-situs kebudayaan seperti candi-candi dan bangunan kuno yang dulunya berfungsi sebagai tempat ibadah. Di tengah masyarakat di era postmodern ini pun, agama tetap menjadi bagian penting yang membangun struktur kebudayaan. Lembaga-lembaga agama, seperti masjid dan pondok pesantren, memiliki kedudukan tertentu di masyarakat sebagai lembaga sosial.

Salah satu fungsi agama dalam masyarakat adalah memberikan pedoman pemecahan masalah pada setiap persoalan yang ada, baik pada tingkat individu, keluarga, atau masyarakat.³⁸ Fungsi tersebut pada hakikatnya merupakan fungsi kebudayaan dari agama. Karena keyakinan dan ajaran agama menjadi dasar orang berperilaku di masyarakat, maka kebudayaan yang terbangun dari perilaku tersebut merupakan kebudayaan berbasis agama. Ada banyak kebudayaan berbasis agama yang masih hidup hingga saat ini. Seperti tradisi slametan yang dipraktikkan di tengah masyarakat, merupakan tradisi yang lahir dari pemikiran kolektif masyarakat

³⁷ Laode Monto Bauto "Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol 23, No 2, 2014, hlm. 24.

³⁸ Amri Marzali, "Agama dan Kebudayaan", *Jurnal UMBARA*, Vol 1 Nomor 1, 2016, hlm. 71.

yang menekankan pentingnya bersyukur atas segala kenikmatan yang diperoleh.

Clifford Geertz dalam penelitiannya di Mojokuto mencatat bahwa upacara slametan di masyarakat Jawa dilakukan untuk memperingati beberapa momen penting seperti kelahiran, khitanan, dan kematian.³⁹ Upacara ini pada mulanya merupakan tradisi agama Hindu. Akan tetapi, setelah menyebarnya Islam, upacara ini dipertahankan bentuknya, namun isi dan filosofi dasarnya disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Selain itu, agama juga dipahami sebagai hasil dialektika kompromistik antara wahyu dan pemikiran subjektif manusia.⁴⁰ Pemikiran manusia merupakan hasil kebudayaan. Dengan demikian, hal ini juga mengisyaratkan bahwa di dalam praktik pengamalan keagamaan terdapat dimensi kebudayaan. Di dalam Islam, akidah dan syariah memiliki dua bagian, yaitu bagian *ushul* (pokok) dan *furu`* (cabang). Bagian cabang dalam agama membuka ruang cukup lebar untuk diinterpretasi oleh manusia. Misalnya dalam hal lantunan *puji-pujian* setelah kumandang azan. Bagi sebagian kelompok Muslim tradisonal, meskipun hal tersebut tidak diajarkan di dalam referensi Islam pokok, juga tidak terdapat dalam tradisi muslim awal, namun hal tersebut dilakukan sebagai tradisi baru yang berfungsi memanggil orang beribadah di masjid.

³⁹ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 31.

⁴⁰ Roibin, "Agama dan Budaya: Relasi Konfrontatif atau Kompromistik", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 1 No 1, 2010, hlm.5.

Hubungan antara agama dan kebudayaan dapat digambarkan seperti dua hal yang mirip tetapi tidak dapat disatukan.⁴¹ Hal ini disebabkan karena agama bersifat mutlak dan tidak bisa dirubah, sedangkan budaya memiliki sifat relatif dan bisa dirubah. Sisi kemutlakan agama ada pada ajaran-ajaran pokoknya. Pada satu sisi, pengamalan keagamaan bisa saja berbeda-beda bentuk sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Di Indonesia, khususnya di Jawa, pakaian yang biasa digunakan untuk melaksanakan salat di *langgar* atau masjid adalah baju koko, sarung, dan peci. Sarung dalam persepsi masyarakat Jawa bahkan identik dengan pakaian ibadah. Hal ini merupakan contoh modifikasi keagamaan yang berbasis lokalitas kebudayaan.

Agama juga memiliki dimensi gerakan sosial. Gerakan sosial yang berbasis agama menjadi salah satu bentuk ekspresi keagamaan untuk menjawab tuntutan perkembangan kebutuhan keberagaman yang semakin kompleks.⁴² Akhir-akhir ini, di tengah masyarakat banyak muncul gerakan sosial berbasis spiritualitas Islam seperti gerakan salat subuh berjamaah, gerakan Indonesia tanpa JIL, gerakan Indonesia tanpa pacaran, dan lain sebagainya. Semua gerakan tersebut lahir dari inisiatif menghidupkan ajaran tertentu dalam yang ada dalam agama.

Menurut Nottingham, gerakan sosial berbasis agama merupakan kegiatan yang terorganisir untuk

⁴¹ M. Arif Khoiruddin, "Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam", Jurnal Tribakti, Vol 26 No 1, 2015, hlm. 119.

⁴² Thohir Yuli Kusmanto, "Gerakan Sosial Keagamaan pada Komunitas Urban: Studi Kasus Gerakan Pengajian Ahad Pagi Bersama di Palembang, kota Semarang", Jurnal Sosiologi Walisongo, Vol 1 No 1 (2017), hlm. 79-98.

menyebarkan interpretasi agama baru kepada masyarakat.⁴³ Dalam hal ini, gerakan Hizbut Tahrir Indonesia -terlepas dari kontroversi interpretasi keagamaannya- dapat juga disebut sebagai sebuah gerakan sosial berbasis agama. Bagaimanapun, HTI lahir atas dasar perjuangan menegakkan apa yang mereka sebut sebagai “khilafah islamiyah” yang mereka interpretasikan sebagai kewajiban politik bagi umat Islam.

Gerakan sosial berbasis agama Islam merupakan respons dari kondisi sosial yang sedang dihadapi oleh umat Islam.⁴⁴ Biasanya, sebuah gerakan muncul sebagai reaksi kritik terhadap realitas sosial yang ada. Seperti, kritik terhadap kepemimpinan gubernur DKI pada 2017 yang melahirkan demonstrasi 411 dan 212, kritik terhadap tatanan sosial politik melahirkan HTI, kritik terhadap realitas ekonomi lembaga-lembaga zakat, infaq, dan sedekah, dan lain sebagainya. Sebuah gerakan sosial bisa saja mewujudkan diri dalam bentuk ormas resmi, atau ormas tidak resmi, atau bahkan bisa juga dalam bentuk organisasi terlarang.

Perkembangan media sosial juga turut mengembangkan bentuk gerakan sosial berbasis agama Islam yang ada, salah satunya muncul jaringan di media sosial dengan nama *One Day One Juz* yang

⁴³ Abdullah, “Gerakan Sosial Kegamanaan Islam”, Skripsi Fakultas Sosiologi Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. Xxxvi.

⁴⁴ Syarifudin Jurdi, Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik, dan Tipologi Artikulasi Gerakan”, Jurnal Politik Profetik, Vol 1 Nomor 1, 2013, hlm.1.

berorientasi pada pembinaan spiritual pengikutnya.⁴⁵ Pada prinsipnya, setiap ajaran agama mendorong pengamalan di dunia nyata. Di dalam Islam, pengamalan-pengalaman ajaran agama tersebut tidak hanya bersifat personal, justru terdapat banyak ajaran yang bersifat sosial. Oleh karenanya, pengamalan agama Islam meniscayakan lahirnya gerakan sosial.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dibaca dan dikaji oleh peneliti yang berhubungan dengan pemikiran KH. Ahmad Dahlan, maupun Ki Hadjar Dewantara.

Pertama, disertasi Doktoral Achmadi yang berjudul "Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya pada Pendidikan".⁴⁶ Penelitian yang merupakan tugas disertasi di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2002 ini meskipun secara tekstual lebih mengarahkan kajiannya kepada Muhammadiyah, namun banyak membahas tentang pemikiran pendirinya, yaitu KH Ahmad Dahlan. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan metode historis dengan mengkaitkan relevansi antara pemikiran Muhammadiyah dengan implementasi pendidikannya. Kesimpulan dari disertasi ini adalah bahwa reformasi pemikiran

⁴⁵ Puji Hariyanti, "Generasi Muda Muslim dan Gerakan Sosial Spiritual Berbasis Media Online" Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 13 Nomor 2, 2016, hlm. 151-178.

⁴⁶ Achmadi, "Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya pada Pendidikan", (Disertasi UIN Yogyakarta, 2002), hlm. 30-45.

Muhammadiyah tertunda dan kurang relevan dengan perkembangan zaman. Seharusnya, Muhammadiyah melakukan aktualisasi pemikirannya agar lebih dapat bersinergi dengan perkembangan zaman. Selain itu, menurut Achmadi, pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah di sekolah-sekolah Muhammadiyah perlu dikonstruksi ulang. Sebaiknya dijadikan sebagai nilai, bukan sekedar mata pelajaran.

Kedua, penelitian Suliswiyadi⁴⁷ pada tahun 2011 dengan judul “Pengembangan Nilai Keberagaman Pada Pendidikan Agama di SLTA Muhammadiyah Kabupaten Magelang”. Penelitian yang disusun sebagai disertasi doctoral di UIN Sunan Kalijaga ini, sama seperti Achmadi, memang secara redaksional membahas tentang pendidikan Muhammadiyah. Namun, pada bab 2, Suliswiyadi mengkaji biografi dan pemikiran pendidikan KH Ahmad Dahlan secara mendalam. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah titik tekannya. Suliswiyadi lebih membahas tentang pendidikan secara umum, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada konseptualisasi pendidikan karakter.

Ketiga, penelitian Jahdan Ibnu Humam Saleh⁴⁸ dengan judul “Perkembangan Pendidikan Muhammadiyah pada Pemukiman Santri di Kota

⁴⁷ Suliswiyadi, “Pengembangan Nilai Keberagaman Pada Pendidikan Agama di SLTA Muhammadiyah Kabupaten Magelang”, (Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 23.

⁴⁸ Jahdan Ibnu Humam Saleh, “Perkembangan Pendidikan Muhammadiyah pada Pemukiman Santri di Kota Yogyakarta 1912-1942”, (Disertasi UGM, 2008), hlm. 32-34.

Yogyakarta 1912-1942". Penelitian yang merupakan disertasi doctoral di Universitas Gadjah Mada ini, memfokuskan diri pada perkembangan historis pendidikan Muhammadiyah. Secara sekilas, Jahdan juga membahas tentang biografi dan pemikiran Ahmad Dahlan. Menurutnya, Muhammadiyah pada masa pra kemerdekaan merupakan jaringan pendidikan terbesar dan paling berpengaruh di kota Yogyakarta. Hal ini tentu wajar mengingat Yogyakarta memang merupakan kota yang menjadi tempat lahirnya Muhammadiyah. Akan tetapi, penelitian ini tidak secara konseptual membahas tentang pendidikan karakter.

Keempat, penelitian Abdul Munir Mulkhan⁴⁹ pada tahun 1999 dengan judul "Gerakan "Pemurnian Islam" di Pedesaan (Kasus Muhammadiyah Kecamatan Wuluhan Jember Jawa Timur)". Penelitian yang merupakan disertasi doctoral di Universitas Gadjah Mada ini memiliki kontribusi sebagai informasi tentang mindset keagamaan warga Muhammadiyah pada level akar rumput (grass root). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan konsep hubungan dialektik agama dan dinamika sosial penganut. Penelitian ini bergerak dari observasi awal tentang empat kelompok: Al ikhlas, kyai dahlan, munu, dan Marmud, yang menunjuk kadar kemurnian islam dan partisipasi kelembagaan masing-masing. Dari sini ditarik 2 tipe ideal; a. islamisasi, jika tbc ditolak, dan b.

⁴⁹ Abdul Munir Mulkhan, "Gerakan "Pemurnian Islam" di Pedesaan (Kasus Muhammadiyah Kecamatan Wuluhan Jember Jawa Timur)", (Disertasi UGM, 1999), hlm. 23.

pribumisasi, jika sebaliknya. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah pada fokusnya. Abdul Munir Mul Khan memfokuskan kajiannya pada respon masyarakat pedesaan (budaya) terhadap pemikiran Muhammadiyah (agama), dan respon Muhammadiyah (agama) pada masyarakat pedesaan (budaya).

Kelima, penelitian Ismu Tri Parmi⁵⁰ yang berjudul "Refleksi Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang berwawasan Nasional Menuju Integrasi Nasional: Sebuah Pendekatan Historis Kultural". Penelitian yang merupakan disertasi doctoral di Universitas Negeri Yogyakarta ini melakukan kajian historis pada pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah tawaran konseptual yang menjadi antitesa dari mainstream pemikiran pendidikan saat ini yang cenderung ke Barat. Ismu menyimpulkan bahwa konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang berbasis kepada budaya dan kearifan lokal justru sangat relevan untuk diterapkan dalam skala nasional untuk mengantisipasi gejala degradasi moral yang saat ini melanda generasi muda Indonesia.

Keenam, buku Dyah Kumala⁵¹ yang berjudul "Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara". Buku yang merupakan adaptasi dari disertasi doctoral di Universitas Negeri Yogyakarta ini mengkaji secara mendalam tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara

⁵⁰ Ismu Tri Parmi, "Refleksi Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang berwawasan Nasional Menuju Integrasi Nasional: Sebuah Pendekatan Historis Kultural", (Disertasi UNY, 2009), hlm 25-27.

⁵¹ Dyah Kumala, *Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*, (Yogyakarta, UNY Press, 2013), hlm. 56-58.

dalam perspektif historis-kultural. Menurutnya, Ki Hadjar Dewantara memiliki tipologi pemikiran yang sangat pribumi, yaitu sangat mengedepankan kebudayaan lokal dibanding mengadopsi nilai-nilai dari asing.

Setelah melakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang ada hanya bersifat single, dan belum melakukan komparasi-komparasi. Sepanjang pengetahuan penulis, penulis belum menemukan penelitian yang mengkomparasikan pemikiran KH Ahmad Dahlan dengan Ki Hadjar Dewantara. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, penelitian ini memenuhi syarat kebaruan dan kemutaakhiran.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran dan Kiprah Pendidikannya

Ki hadjar Dewantara lahir dari keluarga kelas priyayi pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama asli Soewardi Soerjaningrat.⁵² Menurut Greetz, ada dua kelompok masyarakat kelas priyayi, yaitu keturunan raja-raja besar Jawa pada zaman sebelum penjajahan Belanda, dan kelompok bangsawan yang bekerja sebagai instrumen kebijakan kolonial Belanda.⁵³ Dalam hal ini, Ki Hadjar Dewantara merupakan keturunan keluarga Pakualaman, yaitu putra dari GBH Soerjaningrat atau cucu dari Sri Paku Alam III.⁵⁴ Keturunan Pakualaman merupakan keluarga “darah biru” hingga sekarang, di antaranya, karena jabatan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini tetap merupakan hak untuk keluarga ini.

Dengan demikian, Ki hadjar Dewantara kecil hidup di tengah kultur keluarga bangsawan yang

⁵² Suhartono Wiryopranoto, dkk, *Ki hadjar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 9.

⁵³ Clifford Greetz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 330.

⁵⁴ Suhartono Wiryopranoto, *Ki hadjar Dewantara*, hlm. 9.

sangat kental dengan nilai-nilai kebudayaan Jawa. Kuatnya sisi kultural ini di antaranya dilihat dari pernikahan Ki Hadjar Dewantara yang melalui upacara nikah gantung pada 1907.⁵⁵ Nikah gantung adalah pernikahan seperti pernikahan pada umumnya, namun kedua mempelai belum tinggal satu rumah dan keduanya masih menjadi tanggungan orang tua masing-masing.⁵⁶ Itu artinya, nikah gantung tersebut dilaksanakan pada saat Ki Hadjar Dewantara baru berusia 18 tahun.

Sebelum bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1946, Kadipaten Pakualaman merupakan salah satu dari empat kerajaan yang ada di tanah Jawa. Berdirinya kadipaten Pakualaman menjadi sebuah otoritas yang otonom diawali dengan disepakatinya perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Isi dari perjanjian tersebut membagi kerajaan mataram menjadi dua, yaitu kesultanan Surakarta dan kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya, kesultanan Yogyakarta dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.⁵⁷

Menurut catatan Rafles, setelah perjanjian giyatri Sultan menetapkan ibu kota kesultanan di *Yugya Kerta*⁵⁸, sebuah wilayah yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Yogyakarta.

⁵⁵ Hah. Harahap dan Bambang Sokawati Dewantara, Ki Hadjar Dewantara dan Kawan-kawan: Ditangkap, Dipenjara, dan Diasingkan, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hlm. 2.

⁵⁶ Mohammad Hazwan, "Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang", Skripsi UIN Sumatera Utara, 2017, hlm. 2.

⁵⁷ Abdurrachman Sujomiharjo, Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 19.

⁵⁸ Thomas Stamford Raffles, The History of Java, Terj. Eko Prasetyaningrum, dkk. (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2016), hlm. 581.

Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh seorang sultan, sedangkan Pakualaman dipimpin oleh seorang Adipati. Di tengah kultur keluarga Pakualaman inilah Ki Hadjar Dewantara dibesarkan. Meskipun begitu, sejak kecil ia memiliki kepedulian terhadap persamaan derajat dengan rakyat. Hal itu, salah satunya, dilihat dari inisiatifnya mengubah namanya dari nama ningrat menjadi nama yang lebih akrab dengan rakyat.

Sebagai bagian dari keluarga ningrat, Ki Hadjar Dewantara menyenangi pendidikan yang baik sejak kecil. Ia menamatkan sekolah dasar di *Europeesce Lagere School (ELS)*,⁵⁹ sebuah sekolah untuk anak-anak Belanda pada saat itu. Sekolah ini merupakan sekolah elite yang pada waktu itu tidak bisa diakses oleh pribumi, kecuali hanya beberapa saja dari kalangan priyayi. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di *Kweek School* di Yogyakarta.⁶⁰ *Kweek School* adalah sekolah untuk mendidik para calon guru pada saat itu.

Pada saat usianya menginjak dewasa, ia melanjutkan pendidikannya di STOVIA, yaitu sekolah tinggi pertama yang bertujuan mencetak dokter pribumi.⁶¹ Meskipun tidak sampai tamat, namun di STOVIA inilah Ki Hadjar Dewantara bertemu dengan para pemuda Indonesia lainnya seperti Sutomo yang pada akhirnya mewarnai kiprah sosialnya di kemudian hari. Pendirian STOVIA sendiri sebenarnya lebih diorientasikan untuk mengakomodasi

⁵⁹ Suhartono Wiryopranoto, *Ki hadjar Dewantara*, hlm. 9.

⁶⁰ Gunawan, "Berjalan Tanpa Henti dan Tak Kenal Lelah" dalam *Peringatan*

⁷⁰ Tahun Taman Siswa, (Yogyakarta: MLPTS, 1992), hlm. 302-303.

⁶¹ Suhartono Wiryopranoto, *Ki hadjar Dewantara*, hlm. 10.

kepentingan Belanda yang saat itu membutuhkan banyak tenaga medis karena banyaknya penyebaran wabah penyakit di Jawa. Dengan membuka sekolah kedokteran bagi kaum pribumi, Belanda akan mendapatkan stok tenaga medis dengan biaya yang relatif murah dibandingkan jika harus mendatangkan dokter dari Eropa. Dengan kata lain, tujuan didirikannya STOVIA sebenarnya adalah untuk mendapatkan "buruh terdidik" yaitu dokter dari kalangan pribumi yang bekerja demi kepentingan Belanda.

Kebijakan pemerintah Belanda yang membuka ruang bagi kaum pribumi untuk mengenyam pendidikan ini pada gilirannya justru menjadi bumerang bagi eksistensi kolonialisme di Indonesia. Palsunya, banyak lulusan STOVIA yang justru menjadi tokoh-tokoh pergerakan yang menyadarkan masyarakat Indonesia untuk menentang kolonialisme dan menyuarakan kemerdekaan, diantaranya Sutomo, Cipto Mangunkusumo, dan Wahidin.

Kepincangan dalam masyarakat kolonial adalah kuatnya diskriminasi sosial dan politik. Usaha mempertahankan diskriminasi ini dimaksudkan agar terjaga kewibawaan kolonial dan membuat distansi dengan masyarakat pribumi tetap terjaga. Dengan kata lain, diskriminasi melanggengkan penjajahan.⁶²

Itulah sebabnya pendekatan terhadap bumiputra merupakan hal tabu. Sistem kolonialisme Belanda yang menjauhkan antara penjajah dan terjajah tetap terpelihara sehingga mobilitas vertikal kaum pribumi tetap terkontrol. Komunikasi sosial politik antara

⁶² Suhartono Wiryopranoto, Ki hadjar Dewantara, hlm. 18.

penjajah dan terjajah sangat renggang dan bahkan terjadi jurang yang dalam sehingga melanggengkan sistem pemerintahan tidak langsung, artinya masyarakat pribumi tetap diperintah penguasa tradisional, sehingga penguasa kolonial cukup menghubungi penguasa bumiputera dalam menjalankan pemerintahan kolonial.

Bagaimana cara pemerintah kolonial menjauhkan diri dari jangkauan masyarakat bumiputra antara lain dengan mengeluarkan RR 111 (Regeerings Reglement), atau Peraturan Pemerintah Kolonial yang membatasi gerak politik masyarakat bumiputra. Jadi, sebenarnya pemerintah kolonial sudah menutup aktivitas politik terhadap pemerintah kolonial. RR 111 ini sudah terbit untuk mengantisipasi gerakan politik sehingga gerakan MaKi Hadjar Dewantaraa Jawa yang timbul kemudian dalam bentuk gerakan kultural sebagaimana kemudian dimanifestasikan dalam lahirnya organisasi Budi Utomo (BU) pada 20 Mei 1908. Dari kaca mata politik dapat dipandang lahirnya BU adalah terobosan terhadap RR 111.⁶³ Para priyayi Jawa, dokter Wahidin Sudirohusodo, berkolaborasi dengan mahasiswa STOVIA, Sutomo dan kawan-kawannya, berhasil menghimpun diri dalam memajukan masyarakat Jawa pada waktu itu lewat pendidikan, sehingga pemerintah kolonial tidak dapat menindak gerakan BU, yang berbasiskan gerakan kultural. Selain itu, era lahirnya BU sejalan dengan politik kolonial etis yang memberi kesempatan pendidikan kepada masyarakat Jawa meski memiliki interes

⁶³ Suhartono Wiryopranoto, Ki hadjar Dewantara, hlm. 23.

kolonial yang kapitalistis. Politik kolonial waktu itu dengan triasnya sebagai bagian dari humanisme yang terselubung oleh kepentingan kapitalisme, artinya meski kemudahan etisisme tetapi yang diharapkan adalah keuntungan kolonial yang lebih banyak lagi.

Partisipasi dan resistensi yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara cukup panjang dalam perjuangan politik. Pengalaman awal dalam politik ketika ketika Ki Hadjar Dewantara menjadi aktivis dan seksi propaganda BU. Dalam kongres BU (1908), Ki Hadjar Dewantara mengorganisasikan kongres itu. EFE Douwes Dekker (Dowes Dekker) alias Setyabudi Danudirja mendirikan Indische Partij (ip) di Bandung pada 25 Desember 1912.⁶⁴ Ki Hadjar Dewantara dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo bergabung di dalamnya. Mengapa terjadi kolaborasi Indo dan bumiputra tidak lain ingin membangun kekuatan besar untuk menghadapi pemerintah kolonial. Kaum Indo yang tersisih dari pergaulan totok harus membangun solidaritas campuran Indo dan Bumiputra yang juga terhegemoni oleh pemerintah kolonial. Oleh karena itu, dalam ip berkolaborasi Dowes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo yang dikenal "Tiga Serangkai" merupakan kekuatan nasionalis awal pergerakan.

Dalam IP, kolaborasi bersama Dowes Dekker, Ki Hadjar Dewantara dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo makin radikal. Kombinasi Indo dan bumiputra, menjadi kekuatan yang mampu menghadapi pemerintah kolonial. Tiga orang tokoh ip mempunyai pengalaman terpinggirkan dalam masyarakat

⁶⁴ Suhartono Wiryopranoto, Ki hadjar Dewantara, hlm. 28.

tindakan tersebut sesuai dengan kebebasannya sendiri, tidak dikendalikan oleh orang atau bangsa lain. Kedua mandiri berarti mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan jati diri Indonesia.

B. KH Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kiprah Pendidikannya

KH Ahmad Dahlan lahir dan mengenyam manis pahit kehidupan sejak kecil hingga remaja di sebuah kampung yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Jawa, yaitu kampung Kauman, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah administrasi kota Yogyakarta. Sampai saat ini, Kauman masih menjadi salah satu perkampungan santri yang sebagian besar penduduknya merupakan pengikut organisasi Muhammadiyah, organisasi besar di Indonesia yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan. Di kampung ini, jejak-jejak pemikiran KH Ahmad Dahlan masih tersisa dalam lanskap sosial kebudayaan masyarakatnya.

Kauman pada saat KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah bagian dari birokrasi Kesultanan Yogyakarta. Oleh karenanya, untuk memahami bangunan sosio-budaya Kauman, harus dipahami terlebih dahulu beberapa bagian dari sejarah Kesultanan Yogyakarta itu sendiri.⁶⁹ Gelar Kiai Haji yang disematkan pada namanya menunjukkan bahwa ia memiliki kedudukan sosial yang tinggi di tengah masyarakat.

⁶⁹ Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 9.

Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu, karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen dan macam-macam tuduhan lain. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Srandakan, Wonosari, dan Imogiri dan lain-lain tempat telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka KH. Ahmad Dahlan mensiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul

Maka tidak mengejutkan bila dalam pidato terakhir bulan Desember 1922, sebelum meninggal dunia, Dahlan menyatakan bahwa problem utama mengapa umat Islam lemah dan sulit bekerjasama ialah karena setiap orang, pemimpin dan kelompok, merasa paling benar sendiri, dan menganggap segala yang datang dari orang lain, apalagi yang memusuhi, selalu salah, buruk dan jahat. Pesan pidato Kyai Dahlan tersebut diabadikan Charles Kurzman,) di bawah judul "The Unity of Human Life".

C. Diskusi: Konseptualisasi PAI Berbasis Kebudayaan dan Gerakan Sosial

Dalam sejarah perjalanan manusia, pendidikan selalu menjadi awal dari setiap perubahan yang terjadi. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, misalnya, tidak terjadi serta merta begitu saja. Jauh sebelum proklamasi terjadi, masyarakat Indonesia telah mengalami sebuah transformasi pemikiran yang terbangun melalui proses pendidikan. Pada awal abad 20, kesadaran tentang kemandirian dan kemerdekaan Indonesia mulai muncul. Lahirnya beberapa organisasi seperti Serikat Dagang Islam (yang kemudian bermetamorfosa menjadi Sarikat Islam) pada tahun 1905 yang kemudian disusul secara estafet oleh Jami'at Al Khoir, Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdhotul Ulama, dan lain-lain, menegaskan sebuah fakta bahwa proses pendidikan di nusantara telah mulai mengalami transformasi yang sangat signifikan. Bisa dikatakan, proklamasi kemerdekaan adalah akumulasi dari serangkaian proses tersebut.

Boedi Oetomo, yang oleh pemerintah dinobatkan sebagai simbol kebangkitan nasional, sebenarnya bukan organisasi pribumi yang pertama kali muncul di Indonesia. Sebelumnya, Sarikat Dagang Islam telah eksis di Solo dan beberapa kota lainnya pada saat yang relatif bersamaan dengan terjadinya gerakan Pan-Islamisme di Timur Tengah. Pada awal abad 20, di dunia Arab terjadi gerakan reformasi pemikiran yang menyuarakan kebangkitan dunia Islam dan mendorong kemerdekaan dari cengkeraman penjajah. Beberapa tokoh Indonesia seperti Ahmad Dahlan dan Muhamammad Zamzam (pendiri Persatuan Islam), dan Ahmad Sukarti (pendiri Al Irsyad) tercatat pernah `berkuliah` di Mekkah dan bersinggungan langsung dengan tokoh-tokoh utama dalam gerakan tersebut. Ahmad Dahlan, misalnya, secara eksplisit menyatakan bahwa pemikiran Muhammad Abduh (tokoh pembaharu dari Mesir) dan Jamaluddin Al Afghani, sangat memberikan pengaruh kepada corak berpikirnya. Jika melihat bahwa sebagian besar tokoh kebangkitan nasional pra-kemerdekaan ternyata memiliki akar genesis pemikiran dari Timur Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kebangkitan nasional di Indonesia pada awal abad 20 dipengaruhi secara langsung oleh Pan-Islamisme yang terjadi di Timur Tengah.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia menjadikan Boedi Oetomo, bukan SDI, sebagai simbol Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) barangkali lebih disebabkan karena sifat nasionalis yang melekat pada Boedi Oetomo. Hal ini bukan berarti bahwa SDI

tidak nasionalis, melainkan keidentikan SDI dengan karakteristik Islam dikhawatirkan memunculkan persepsi bahwa Harkitnas merupakan peringatan agama, bukan peringatan nasional. Mengingat bahwa piagam Jakarta dan Pancasila yang menjadi falsafah Negara telah mengakomodir beberapa agama di luar Islam. Jika SDI yang dijadikan simbol, meskipun sebenarnya memang layak, dikhawatirkan akan muncul kecemburuan teologis dari penganut agama di luar Islam.

Kebijakan seperti itu tampaknya diterapkan bukan hanya dalam konteks Harkitnas saja, namun juga pada beberapa hal yang lain seperti siapa yang dipandang pantas untuk dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Pilihan pemerintah ternyata jatuh kepada Ki Hadjar Dewantara, bukan kepada KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari, dua tokoh pendiri Ormas Islam terbesar, yang keduanya juga telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendidik anak bangsa; Muhammadiyah dengan pendidikan sekolahnya dan Nahdhotul Ulama dengan pendidikan pesantrennya.

Muhammadiyah sendiri merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dan diresmikan pada tahun 1912 di Kauman Yogyakarta. Melalui organisasi inilah KH Ahmad Dahlan melakukan agenda-agendanya. Fokus utama dalam gerakan Muhammadiyah pada periode awal adalah bidang sosial dan pendidikan. Bidang sosial dengan mendirikan panti asuhan, sedangkan bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah. Sebagai tokoh yang lahir dari lingkungan santri yang

berpaham modern, KH Ahmad Dahlan mengkonstruksi sebuah model pendidikan Islam yang di luar *mainstream* pada waktu itu, yaitu sekolah Islam dengan mengadopsi sekolah model *gubermen* ala Belanda.

Data pada tahun 2000 di Pimpinan Pusat, Muhammadiyah memiliki 2896 sekolah tingkat dasar (SD/MI), 1713 sekolah menengah pertama (SMP/MTs), 680 sekolah menengah atas (SMA/MA), dan 132 perguruan tinggi (Universitas/Politeknik/Sekolah Tinggi).⁷⁰ Data tersebut memang merupakan data 15 tahun yang lalu. Penulis belum melakukan konfirmasi ulang di Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait data terbaru. Namun, poin yang penting digaris bawahi di sini adalah bahwa pendidikan Muhammadiyah memiliki kontribusi yang luar biasa besar terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia.

Meneropong Muhammadiyah tanpa meninjau pendidikannya tidak akan memperoleh gambaran yang utuh karena pembaharuan pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembaharuan pemikiran keagamaan dan merupakan faktor penting yang menjadi ciri modernitas.⁷¹ Secara garis besar, Kuntowijoyo membagi periodisasi Muhammadiyah menjadi dua. Pertama, periode awal perkembangan yang merupakan dinamika kualitatif, yaitu fase pembentukan doktrin yang sarat dengan

⁷⁰ Achmadi, "Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan", (Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 1.

⁷¹ Achmad Jainuri, "Tradisi Tajdid dalam Sejarah Islam", *Suara Muhammadiyah* No. 05/08/1995, hlm. 23.

kegiatan ijtihad dan tajdid. Kedua, periode berikutnya sampai saat ini merupakan dinamika kuantitatif yaitu fase pelaksanaan doktrin atau tahap mewujudkan cita-cita awalnya, sehingga seakan-akan tugas Muhammadiyah di bidang tajdid telah selesai.⁷²

Pendapat Kuntowijoyo tentang Muhammadiyah, sebagaimana dijelaskan di atas, memang sangat subyektif. Akan tetapi, setidaknya dapat dijadikan sebagai pijakan untuk berasumsi bahwa pemikiran Muhammadiyah secara garis besar mengalami konsistensi. Apa yang dimaksud sebagai konsistensi di sini bukan berarti tidak mengalami dinamika. Karena dinamika pemikiran di Muhammadiyah tetap mengalami pasang surut, namun tidak terlepas dari pagu utama yang digariskan oleh pendirinya, yaitu KH. Ahmad Dahlan.

Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dikembangkan dari Al Quran dan Hadist. Penelitian ini tidak akan mengkaji pemikiran KH. Ahmad Dahlan secara umum, namun hanya akan lebih fokus pada pemikiran pendidikannya yang termanifestasikan dalam pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah yang saat ini sudah berjumlah ribuan.

Berbeda dengan KH. Ahmad Dahlan, Ki Hadjar Dewantara merupakan tokoh pendidikan yang lebih berfokus pada pengembangan budi pekerti yang berbasis kepada budaya lokal. Pada awal kemerdekaan dulu, Ki Hadjar Dewantara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) lebih banyak

⁷² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 192-193.

mempopulerkan istilah-istilah yang digali dari budaya lokal seperti "tutwuri handayani" yang sekarang menjadi slogan pada logo Depdikbud.⁷³ Bahkan istilah "pancasila", "berdikari" (berdiri di atas kaki sendiri), dan "bhineka tunggal eka" (berbeda-beda namun tetap satu jua) yang merupakan slogan Negara juga diambil dari bahasa lokal. Selain itu, istilah-istilah dan konsep-konsep yang dikenalkan dalam dunia pendidikan juga merupakan istilah asli bahasa Indonesia, seperti "pendidikan budi pekerti", "cipta", "karsa" dan lain sebagainya.

Pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang lebih berorientasi pada pengembangan budaya lokal tersebut dimanifestasikan dengan lembaga pendidikan yang didirikannya, yaitu Yayasan Tamansiswa di Yogyakarta, yang saat ini telah memiliki sekolah dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Meskipun demikian, pendidikan Tamansiswa tidak dapat dibandingkan dengan Pendidikan Muhammadiyah dari sisi jumlahnya. Sebab, Tamansiswa hanya terpusat di kota Yogyakarta, sedangkan sekolah Muhammadiyah menyebar ke seluruh Indonesia.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, Metode yang yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (*care and dedication based on love*). Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras

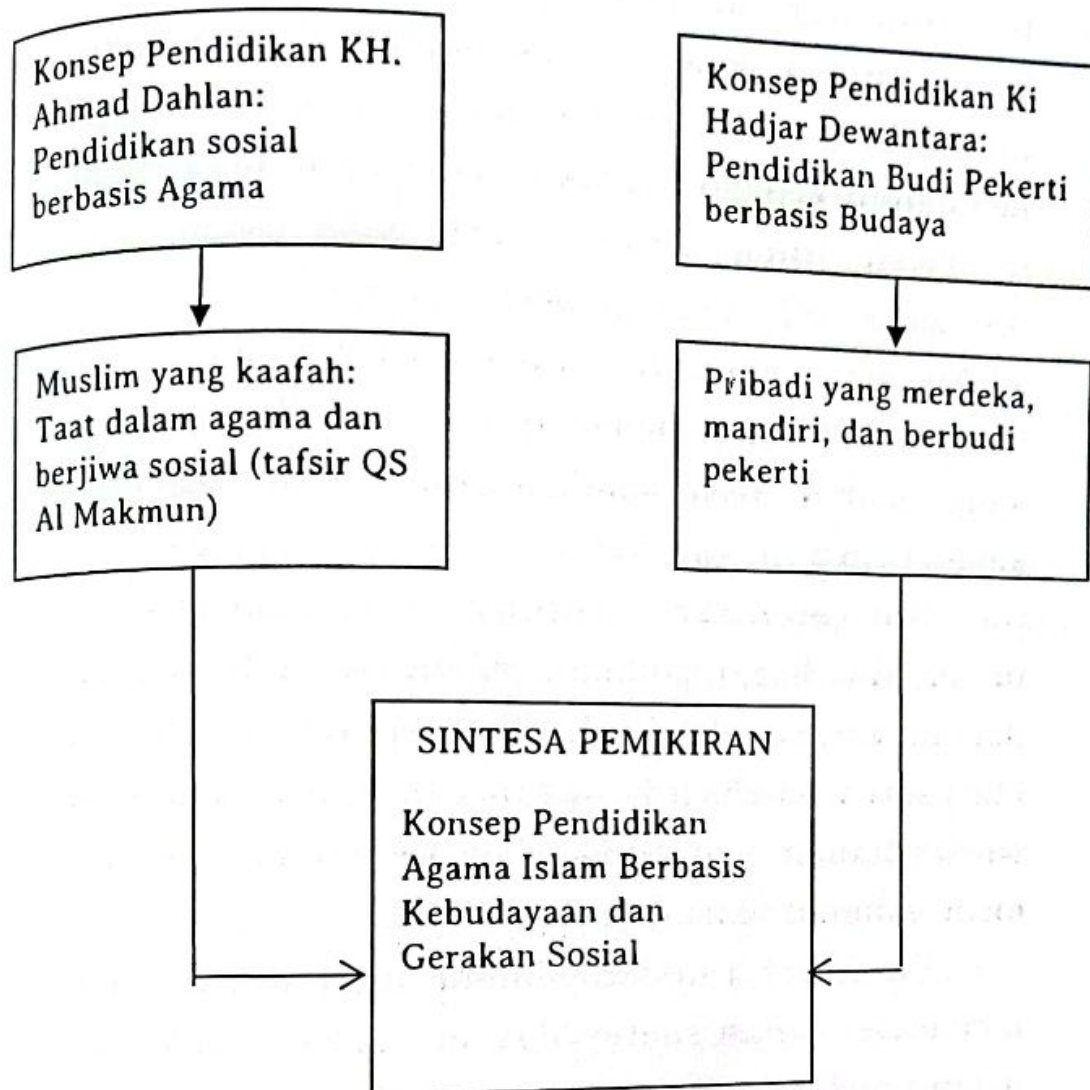
⁷³ Mujib Suherman, *Pendidikan dalam Perspektif Perguruan Taman Siswa*, (Bandung: Kalam Insani Press, 2008), hlm. 23.

yang bermutu dalam kepribadian dan spiritualitas, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Yang utama sebagai pendidik adalah fungsinya sebagai model keteladanan dan sebagai fasilitator kelas.

Nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Modelnya adalah Kyai Semar (menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini). Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak *pandita* juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan.

Baik KH Ahmad Dahlan ataupun Ki Hadjar Dewantara sama-sama sepakat bahwa membangun bangsa harus dimulai dari membangun karakter dan *morality* manusianya melalui proses pendidikan. Hanya saja, basis pemikiran KH. Ahmad Dahlan adalah nilai-nilai agama yang tertuang di dalam kitab suci Al Quran, sedangkan basis pemikiran Ki Hadjar Dewantara adalah nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini akan mengkombinasikan pemikiran pendidikan karakter menurut KH Ahmad Dahlan dan Ki Hadjar Dewantara. Menurut hemat penulis, kedua tokoh ini dapat dibandingkan, mengingat keunikan pemikiran masing-masing pada

bidang pendidikan. Pemikiran keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:



Ki Hadjar Dewantara dan KH Ahmad Dahlan adalah dua orang dari sekelompok ahli dalam praktis pendidikan dan Pendidikan Agama Islam yang menekankan perlunya fungsi Pendidikan Agama Islam sebagai pemelihara warisan budaya, khususnya budaya dalam perspektif "Barat". Kelompok ini menegaskan bahwa semua tradisi-tradisi kultural memiliki akar-akar pembentukannya. Kontinuitas budaya akan memungkinkan hanya jika Pendidikan Agama Islam memelihara warisan ini dengan meneruskan kebenaran-kebenaran yang telah

Konseptualisasi Pendidikan Agama Islam.....| 85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan diskusi hasil, terdapat tiga kesimpulan yang dihasilkan di dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang lebih berorientasi pada pengembangan budaya lokal tersebut dimanifestasikan dengan lembaga pendidikan yang didirikannya, yaitu Yayasan Tamansiswa di Yogyakarta, yang saat ini telah memiliki sekolah dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Meskipun demikian, pendidikan Tamansiswa tidak dapat dibandingkan dengan Pendidikan Muhammadiyah dari sisi jumlahnya. Sebab, Tamansiswa hanya terpusat di kota Yogyakarta, sedangkan sekolah Muhammadiyah menyebar ke seluruh Indonesia.

Kedua, Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dikembangkan dari Al Quran dan hadis. Pemikiran tentang pendidikan agama menurut KH Ahmad Dahlan adalah berbasis pada gerakan sosial. Artinya, gerakan sosial adalah "teori pendidikan Agama Islam" terbaik. Menurutnya, puncak dari ilmu justru

pada pengamalan ilmu tersebut pada dunia sosial nyata.

Ketiga, Pendidikan Agama Islam dapat dibangun dengan konsep yang memadukan antara kebudayaan dan gerakan sosial. Karena Agama Islam sendiri secara alamiah memang mengandung dimensi kebudayaan dan gerakan sosial. Ketiganya merupakan sebuah kesatuan yang utuh.

B. Penutup

Penelitian ini berupaya untuk menyambungkan pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang berbasis kebudayaan kurang nuansa keagamaannya, dengan pemikiran pendidikan KH Ahmad Dahlan yang berbasis gerakan sosial namun kurang dari penguatan kebudayaannya. Harapannya, diskusi di dalam penelitian ini dapat menjadi jembatan yang menyatukan dua pemikiran tersebut dalam sebuah konsep terpadu Pendidikan Agama Islam berbasis pada Kebudayaan dan Gerakan Sosial.

Meskipun demikian, sudah tentu penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Baik dari sisi metodologi, argumentasi, dan teknis penulisannya. Oleh karena itu, atas segala kekurangan tersebut peneliti menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mul Khan, "Gerakan "Pemurnian Islam" di Pedesaan (Kasus Muhammadiyah Kecamatan Wuluhan Jember Jawa Timur)", Disertasi UGM, 1999.
- Achmad Jainuri, "Tradisi Tajdid dalam Sejarah Islam", *Suara Muhammadiyah* No. 05/08/1995.
- Achmadi, "Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan", Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Bagus Gunawan, *Percikan Pemikiran Tokoh Pendidikan Nusantara: Dari Era Mataram sampai Kemerdekaan*, Solo: Media Tama, 2013.
- Budi Mulyono, *Interpretasi Budaya dalam Perspektif Clifford Geertz*, Yogyakarta: Arruz Media, 2011.
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, Ter. Alma Sujianti, Bandung: Kaukaus, 2009.
- Danar Gayuh, *Pendidikan Postmodernisme dalam Perspektif Budaya*, Bandung, Kalam Insani, 2012.
- Dyah Kumala, *Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*, Yogyakarta, UNY Press, 2013.
- H.AR. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Ismu Tri Parmi, "Refleksi Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang berwawasan Nasional Menuju

- Integrasi Nasional: Sebuah Pendekatan Historis Kultural”, Disertasi UNY, 2009.
- Jahdan Ibnu Humam Saleh, “Perkembangan Pendidikan Muhammadiyah pada Pemukiman Santri di Kota Yogyakarta 1912-1942”, Disertasi UGM, 2008.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- _____, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya, 2007.
- Mujib Suherman, *Pendidikan dalam Perspektif Perguruan Taman Siswa*, Bandung: Kalam Insani Press, 2008.
- Sukardi, dkk, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung: Bulan Bintang, 1978.
- Suliswiyadi, “Pengembangan Nilai Keberagamaan Pada Pendidikan Agama di SLTA Muhammadiyah Kabupaten Magelang”, Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- T. Ibrahim Alfian dkk., *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

Pendidikan Agama Islam, khususnya Pendidikan Agama Islam yang ada di masyarakat saat ini secara umum masih kehilangan konteks kemasyarakatan. Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan melalui ceramah-ceramah keagamaan, khutbah jumat, kuliah subuh, pengajian, dan lain sebagainya seharusnya berorientasi pada pengembangan masyarakat. Jika masyarakat diibaratkan sebagai pepohonan, maka yang dimaksud dengan "mengembangkan" di sini artinya Pendidikan Agama Islam seharusnya berfungsi sebagai "pupuk" yang menyuburkan pepohonan tersebut, agar pohon-pohon tersebut dapat tumbuh dengan baik dan bermanfaat. Jadi, tidak perlu mencabut akar pepohonan tersebut dan memindahkannya ke tempat lain.

Penekanan pada simbolisme agama justru melahirkan problem kebudayaan. Sebab, simbol-simbol agama yang biasa digunakan justru merupakan simbol-simbol kebudayaan Arab. Tentu menggunakan simbol budaya Arab bukan merupakan hal yang buruk. Akan tetapi karena agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil `alamin, agama rahmat untuk semua umat manusia dengan berbagai latar belakang etnis dan kebudayaan, maka dengan sendirinya agama Islam mengakomodir kearifan lokal yang ada pada setiap kebudayaan. Maka, seharusnya Pendidikan Agama Islam dikembangkan berdasarkan "fitrah" kebudayaan masyarakatnya. Masalah kedua dalam Pendidikan Agama Islam di masyarakat adalah penekanan agama sebagai dogma, bukan sebagai gerakan sosial. Dalam hal ini, pelaksanaan pendidikan Agama Islam di masyarakat banyak yang masih berhenti pada ceramah, pengajian, khutbah, dan kegiatan-kegiatan lain yang intinya hanya pengayaan "wacana keislaman", bukan "agenda kegiatan". Dalam hal ini, Pendidikan Agama Islam kehilangan konteks sosial. Padahal, justru seharusnya Pendidikan Agama Islam berorientasi pada pemecahan problem-problem sosial yang ada.

Berangkat dari dua masalah tersebut, maka peneliti berupaya untuk melakukan kajian akademik berupa penelitian ilmiah untuk merumuskan konsep Pendidikan Agama Islam yang berbasis pada kebudayaan dan gerakan sosial. Dalam kajian literatur yang dilakukan peneliti, ada dua tokoh pendidikan yang dapat dikomparasikan pemikiran pendidikannya, yaitu KH. Ahmad Dahlan dan Ki Hadjar Dewantara. KH Ahmad Dahlan, menurut hemat penulis, merupakan tokoh agama yang berorientasi pada gerakan sosial. Hal ini dapat dilihat dari gerakannya dalam memobilisasi massa untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan pendidikan melalui panti asuhan dan sekolah-sekolah yang didirikannya. Adapun, Ki Hadjar Dewantara merupakan tokoh penting pendidikan yang dikenal dengan orientasi kebudayaan yang kuat.



📍 Wonocolo Utara V/18 Surabaya
☎ +628977416123
✉ globalaksarapers@gmail.com



ISBN 978 625 5874 64 7

